

**PERAN PASUKAN GARUDA PEREMPUAN DALAM UNITED
NATIONS MULTIDIMENSIONAL INTEGRATED
STABILIZATION MISSION IN THE CENTRAL AFRICAN
REPUBLIC**

SKIRPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana
Sosial (S.Sos.) pada program studi Hubungan Internasional



Oleh

FARAH YUMNA HUSEIN

NIM I92219064

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
JUNI 2023**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Farah Yumna Husein

NIM : I92219064

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Peran Pasukan Garuda Perempuan Dalam United Nations
Multidimensional Integrated Stabilization Mission In The Central African
Republic (MINUSCA)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya peneliti secara mandiri dan bukan merupakan jiplakan atau plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini pada kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil dari plagiasi, peneliti bersedia untuk menanggung segala konsekuensi hukum yang akan terjadi

Surabaya, 22 Juni 2023

Yang menyatakan,



Farah Yumna Husein

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, koreksi, dan arahan terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Farah Yumna Husein
NIM : 192219064
Program Studi : Hubungan Internasional

Yang berjudul **Peran Pasukan Garuda Perempuan dalam United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA)**, saya selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi ini telah diperbaiki dan dapat disajikan dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 22 Juni 2023



Dra. Hj. Wahidah Zein Br Siregar, M.A., Ph.D.
NIP 196901051993032001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi oleh Farah Yumna Husein dengan judul: "Peran Pasukan Garuda Perempuan dalam United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission In The Central African Republic" telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 14 Juli 2023.

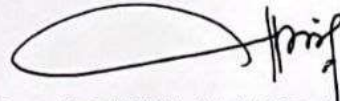
TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



Dra. Hj. Wahidah Zein Br Siregar, M.A., Ph.D.
NIP 196901051993032001

Penguji II



M. Qobidl 'Ainul Arif, S.I.P., M.A., CIOnR.
NIP 198408232015031002

Penguji III



Zudan Rosyidi, SS. MA
NIP 198103232009121004

Penguji IV

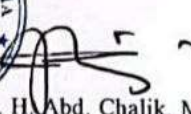


Ajeng Widya Prakasita, M.A.
NIP 199502232020122025

Surabaya, 14 Juli 2023

Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan




Prof. Dr. H. Abd. Chalik, M.Ag.
NIP 197306272000031002

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Farah Yumna Husein
NIM : I92219064
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Hubungan Internasional
E-mail address : Farahyumnaa25@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PERAN PASUKAN GARUDA PEREMPUAN DALAM UNITED NATIONS
MULTIDIMENSIONAL INTEGRATED STABILIZATION MISSION IN THE
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC**


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2023

Penulis

()
Farah Yumna Husein

ABSTRACT

Farah Yumna Husein. 2023. *The Role of Women in Pasukan Garuda in the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic*

This research discusses the role of women in Pasukan Garuda in the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA). By using a descriptive qualitative research method, researchers collected the data through interviews and online data searches. The data analysis technique used is the qualitative data analysis technique of the interactionist model according to Miles and Huberman. Based on the data, it was found that women personnel in Pasukan Garuda also gave their role in the UN peacekeeping mission in accordance with the mandate. Women personnel have fulfilled their role as peacekeepers by carrying out various activities which include 1) perform patrol; 2) creating good interactions with the community; 3) guarding important activities held by government; 4) provide humanitarian aid facilities. In the end, women showed that they could provide a role in accordance with their status as peacekeepers for the MINUSCA mission

Keywords: *Women, Pasukan Garuda, MINUSCA*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai peran Pasukan Garuda perempuan dalam United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission In The Central African Republic (MINUSCA). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang datanya dikumpulkan melalui wawancara dan penelusuran data secara daring. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif model interaksionis menurut Miles and Huberman. Berdasarkan data yang diperoleh, ditemukan fakta bahwa Pasukan Garuda perempuan turut memberikan peran dalam misi perdamaian PBB sesuai dengan mandat yang diberikan. Pasukan Garuda perempuan dalam MINUSCA telah memenuhi peran sebagai *peacekeepers* dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang meliputi 1) melaksanakan patroli; 2) menciptakan interaksi yang baik dengan masyarakat; 3) pengamanan kegiatan penting pemerintah; serta 4) memberikan fasilitas bantuan kemanusiaan. Pada akhirnya perempuan menunjukkan bahwa mereka dapat memberikan peran sesuai dengan statusnya sebagai *peacekeepers* untuk misi MINUSCA.

Kata Kunci: *Perempuan, Pasukan Garuda, MINUSCA*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
GLOSARIUM.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Argumentasi Utama	24
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL	27
A. Peran.....	27
B. Misi Pemeliharaan Perdamaian (<i>Peacekeeping Operations</i>).....	34
C. Pasukan Garuda.....	38
D. Pasukan Garuda Perempuan.....	43
E. MINUSCA	47
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Pendekatan Penelitian	51
B. Subjek Penelitian dan Level Analisis.....	52
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	52
D. Teknik Pengumpulan Data.....	53
E. Teknik Sampling	54
F. Tahap-tahap Penelitian.....	55

G. Teknik Analisis Data.....	57
H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	61
A. Kondisi Di Republik Afrika Tengah.....	61
B. Misi Perdamaian PBB Dalam Menangani Konflik Di Republik Afrika Tengah.....	73
C. Pasukan Garuda Perempuan di Republik Afrika Tengah	79
D. Peran Pasukan Garuda Perempuan Dalam MINUSCA	87
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	105



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Potret kedekatan Ibu Raden Anggie dari Pasukan Garbha FPU 1 MINUSCA dengan anak-anak Republik Afrika Tengah	91
Gambar 4.2 Pasukan Garbha FPU 1 MINUSCA saat berinteraksi dengan masyarakat Republik Afrika Tengah	94



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data peningkatan jumlah masyarakat Republik Afrika Tengah yang memerlukan bantuan kemanusiaan	71
Tabel 4.2 Jumlah Keterlibatan Pasukan Garuda perempuan dalam MINUSCA	82



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

GLOSARIUM

3R	: <i>Return, Reclamation, Rehabilitation</i>
APPR	: <i>The Political Agreement for Peace and Reconciliation</i>
BINUCA Republic	: The UN Integrated Peacebuilding Office in the Central African
BONUCA Republic	: United Nations Peacebuilding Office in the Central African
CIMIC	: <i>Civil military coordination</i>
CPC	: The Coalition of Patriots for Change
DDR	: <i>Disarmament, Demobilization, Reintegration</i>
DDRR	: Disarmament, Demobilization, Reintegration and Repatriation
DK PBB	: Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
DPKO	: Department of Peacekeeping Operations
FACA	: Central African Armed Forces
FPRC	: Popular Front for the Rebirth of Central African Republic
FPU	: <i>Formed Police Unit</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
IPO	: <i>Individual Police Officer</i>
KONGA	: Kontingen Garuda
MINURCA	: United Nations Mission In The Central African Republic
MINURSO Sahara	: United Nations Mission For The Referendum In Western
MINUSCA	: United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission In The Central African Republic
MINUSMA Mission In Mali	: United Nations Multidimensional Integrated Stabilization
MINUSTAH	: United Nations Stabilization Mission In Haiti

MISCA	: The African-led International Support Mission in Central Africa
MONUSCO	: United Nations Organization Stabilization Mission in The Democratic Republic of The Congo
ONUC	: United Nations Operation in the Congo
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PKO	: <i>Peacekeeping Operation</i>
PMPP TNI	: Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI
Polri	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
SEA	: <i>Sexual exploitation and abuse</i>
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UNAMID	: United Nations African Union Hybrid Mission in Darfur-Sudan
UNEF	: United Nations Emergency Force
UNFICYP	: United Nations Peacekeeping Force In Cyprus
UNIFIL	: United Nations Interim Force in Lebanon
UNISFA	: United Nations Interim Security Force For Abyei
UNMISS	: United Nations Mission In South Sudan
UNOB	: United Nations Operation in Burundi
UNTAG	: United Nations Transition Assistance Group
UNTSO	: United Nations Truce Supervision Organization
UPC	: Union for Peace in the Central African Republic

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai konflik telah terjadi di berbagai wilayah negara di dunia. Dalam kajian hubungan internasional, berbagai konflik yang mungkin terjadi dapat menjadi sebuah ancaman bagi keamanan dan perdamaian dunia. Oleh karena itu, perdamaian menjadi tanggung jawab bersama, sehingga membutuhkan kerja sama yang baik dari berbagai pihak untuk dapat mewujudkannya. Salah satu aktor yang berperan besar dalam menjaga perdamaian dunia adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Organisasi internasional yang terbentuk pada tahun 1945 ini, dimulai dengan penandatanganan piagam PBB oleh 50 negara pendirinya. Hingga saat ini, sebanyak 193 negara di dunia telah tergabung dalam keanggotaan PBB, semua anggota ini berkewajiban untuk menjaga perdamaian dan keamanan seluruh bangsa di dunia.²

Salah satu kontribusi penting PBB dalam menjaga keamanan dan mewujudkan perdamaian dunia adalah dengan membentuk *peacekeeping operations* (PKO). PKO pertama kali dilaksanakan pada tahun 1948 dimana pada saat itu PBB membentuk misi *United Nations Truce Supervision Organization* (UNTSO) dengan mengirimkan pasukan militer mereka ke timur tengah untuk mengawasi proses gencatan senjata pada

² Sven Bernhard Gareis, *The United Nations*, 2nd ed (London: Bloomsbury Publishing, 2012), 1

perang antara Arab dan Israel.³Hingga kini PBB telah melaksanakan sebanyak 71 misi perdamaian di berbagai wilayah konflik dengan total misi perdamaian yang masih aktif berjalan sebanyak 12 misi.

Pada dasarnya PKO dilaksanakan untuk dapat mewujudkan perdamaian, mendukung aksi gencatan senjata bagi para pihak yang berkonflik dan mengawasi pelaksanaan perjanjian damai, yang biasanya tercipta antara para pihak yang berkonflik. Selain itu PKO juga dituntut untuk dapat berperan aktif dalam berbagai upaya yang mengarah pada pembentukan perdamaian.⁴

Saat ini PKO telah berkembang bukan hanya menjaga perdamaian dan keamanan tetapi juga berperan dalam memfasilitasi proses politik di negara konflik, melindungi masyarakat sipil, membantu perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi para pelaku konflik, mendukung penyelenggaraan pemilu, melindungi dan memajukan hak asasi manusia, serta membantu negara untuk memulihkan supremasi hukum.⁵ PKO ini juga dikenal dengan sebutan PKO multidimensional karena perannya yang meliputi banyak hal.

Dalam melaksanakan PKO, PBB melibatkan para pasukan militer, polisi dan masyarakat sipil yang dikenal dengan sebutan *peacekeepers*.

³ United Nations, *The Blue Helmet: A Review of United Nations peace-keeping* (New York: United Nations Publication, 1996): 17, diakses pada 13 Januari 2023, <https://digitallibrary.un.org/record/105742>.

⁴ United Nations Department of Peacekeeping Operation, *United Nations Peacekeeping Operation Principles and Guidelines*, (New York: United Nations, 2008): 19, diakses 13 Januari 2023, https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/capstone_eng_0.pdf.

⁵ United Nations Peacekeeping, "What is Peacekeeping," diakses pada 07 Mei 2023, <https://peacekeeping.un.org/en/what-is-peacekeeping>

Peacekeepers yang terlibat dalam PKO merupakan gabungan personel dari berbagai negara anggota PBB yang berkontribusi dalam mengirimkan pasukannya. Hingga tahun 2022, sebanyak 121 negara di dunia telah berkontribusi dalam mengirimkan pasukan mereka untuk bergabung dalam misi perdamaian di bawah naungan PBB.⁶

Saat konflik berlangsung permasalahan yang terjadi bukan hanya terletak pada aspek keamanan wilayah tetapi juga berdampak pada keamanan masyarakat terutama perempuan dan anak-anak. Perempuan dan anak-anak berada dalam keadaan yang rentan mengalami kekerasan dan diskriminasi. Maka dengan adanya permasalahan ini kemudian mendorong PBB untuk melibatkan dan memajukan peran perempuan dalam PKO mereka.⁷

Selama puluhan tahun PKO telah didominasi oleh keterlibatan dari pasukan laki-laki. Hal ini kemudian membuat pekerjaan sebagai *peacekeepers* dianggap sebagai suatu pekerjaan berbahaya yang hanya dapat dilakukan oleh laki-laki. Pada akhirnya peran dari pasukan perempuan kurang mendapatkan perhatian. Padahal dalam kenyataannya bergabungnya perempuan dalam PKO dapat dinilai berperan dalam meningkatkan efektivitas misi yang sedang dijalankan. Hal ini karena para *peacekeepers* perempuan dapat meningkatkan operasi dan kinerja PKO,

⁶ United Nations Peacekeeping, "Peacekeeping Operations Fact Sheet", diakses 13 Januari 2023, https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/peacekeeping_missions_fact_sheet_october_2022_english.pdf.

⁷ Nur Azizah, Hadidah Sallimi, dan Ainun Dwiyaniti, "The Increasing Number of Female Troops in Indonesia's Peacekeeping Operations: Why Women's Presence Matters?," *Journal of Islamic World and Politics* Vol. 6 No. 1, (2022): 83, <https://journal.umy.ac.id/index.php/jiwp/article/view/13509>.

memiliki akses yang lebih mudah ke masyarakat jika dibandingkan dengan pasukan laki-laki, melindungi masyarakat terlebih perempuan dan anak-anak, mudah membangun kepercayaan masyarakat terhadap *peacekeepers* karena merasa mereka akan memahami perasaan korban sesama perempuan, membantu mencegah dan mengurangi konflik maupun konfrontasi, menjadi inspirasi dan model untuk para perempuan dalam wilayah konflik agar dapat ikut serta memperjuangkan hak mereka dan mengembangkan diri.⁸

Department of Peacekeeping Operations (DPKO) yang bertanggung jawab atas berbagai PKO yang ada saat ini terus mendorong peningkatan jumlah keterlibatan perempuan dalam misi perdamaian. Berdasarkan data dari *United Nations Peacekeeping*, hingga pada tahun 2022 perempuan yang terlibat dalam PKO berjumlah sebanyak 6808 orang. 1043 diantaranya (29,9%) bekerja sebagai anggota staf sipil dari total keseluruhan anggota staf. Sedangkan 5765 lainnya bekerja sebagai pasukan anggota militer dan polisi. Secara total, perempuan menempati 7,8% dari jumlah keseluruhan pasukan perdamaian PBB.⁹ Angka ini menggambarkan betapa sedikitnya jumlah perempuan dalam misi perdamaian.

⁸ United Nations Peacekeeping, "Women in Peacekeeping," diakses pada 09 Mei 2023. <https://peacekeeping.un.org/en/women-peacekeeping#:~:text=Women%20peacekeepers%20improve%20overall%20peacekeeping,of%20peace%20and%20political%20processes>.

⁹ United Nations Peacekeeping, "Women in Peacekeeping A Key to Peace," diakses 21 Januari 2023, https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/wipk_infographic_2022.pdf.

Peran perempuan sendiri telah disoroti oleh PBB sejak tahun 2000 melalui pembentukan resolusi 1325 yang berisikan tentang perempuan, perdamaian dan keamanan. Resolusi ini kemudian menyoroti tentang peran penting keterlibatan perempuan dalam pembentukan perdamaian dan penjagaan keamanan. Pembentukan resolusi 1325 didasari atas adanya *Beijing Platform for Action 1995* yang berisikan tentang hak-hak perempuan. Salah satunya yaitu meningkatkan peran perempuan dalam resolusi konflik dan pengambilan keputusan yang kemudian mendorong PBB untuk membentuk resolusi 1325 pada tahun 2000.¹⁰ Kemudian pada tahun 2020 dibentuk lagi resolusi 2538 yang secara khusus berisikan tentang peran dan peningkatan personel perempuan dalam PKO oleh PBB.

Resolusi 2538 ini merupakan salah satu resolusi yang digagas oleh Indonesia. Disahkan oleh Dewan Keamanan PBB selama masa presidensi Indonesia di Dewan Keamanan PBB pada bulan Agustus tahun 2020. Hal ini merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Untuk pertama kali dalam sejarah, Indonesia berhasil menyumbangkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2538 tentang personel Penjaga Perdamaian Perempuan. Resolusi ini kemudian didukung atau disponsori oleh 97 negara anggota PBB.¹¹

Indonesia telah menjadi salah satu negara anggota PBB yang berkontribusi dalam mengirimkan pasukan perdamaian untuk Misi

¹⁰ Mumtazinur, "Peran Perempuan dalam Proses Pemulihan Perdamaian di Burundi melalui Penerapan Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB," *International Journal of Child and Gender Studies* Vol. 3 No. 1 (2017): 89, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/1951>.

¹¹ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Selesai Agustus 2020, Ini Capaian Indonesia Sebagai Presidensi Dewan Keamanan PBB," diakses 20 Januari 2023, <https://setkab.go.id>.

Perdamaian PBB selama kurang lebih 65 tahun sejak dikirimkannya pasukan perdamaian pertama mereka pada tahun 1957. Pasukan perdamaian asal Indonesia dikenal dengan sebutan Pasukan Garuda atau Kontingen Garuda yang biasanya disingkat sebagai KONGA.

Keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian PBB diawali dengan mengirimkan Pasukan Garuda pertama mereka ke Mesir untuk bergabung dalam misi *United Nations Emergency Force* (UNEF).¹² Indonesia hingga kini masih terus aktif dalam berkontribusi untuk mewujudkan keamanan dan perdamaian internasional. Indonesia telah mengirimkan pasukan perdamaian ke berbagai PKO yang dilaksanakan oleh PBB.

Indonesia menjadi salah satu negara yang masuk dalam 10 besar negara penyumbang *peacekeepers*. Pada Desember 2022, pasukan yang dikirim oleh Indonesia sebanyak 2686 personel.¹³ Hal ini kemudian menempatkan Indonesia pada peringkat ke 8 sebagai negara dengan penyumbang *peacekeepers* terbanyak didunia. Indonesia terus menekankan akan pentingnya peran *peacekeepers* dalam mewujudkan perdamaian dunia, dengan selalu aktif dalam mendukung kemajuan *peacekeepers*.

Indonesia juga menekankan akan pentingnya keterlibatan perempuan sebagai *peacekeepers*. Indonesia meyakini keterlibatan

¹² Leonardo F. Hutabarat, "Peningkatan Female Peacekeepers Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB," *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara* Vol. 7 No.2 (2017): 77-78, doi: <https://dx.doi.org/10.33172/jpbh.v7i2.180>.

¹³ United Nations Peacekeeping, "Uniformed Personnel Contributing Countries by Ranking," diakses 13 Januari 2023, <https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors>.

personel perempuan dalam misi perdamaian akan memberikan dampak yang signifikan dalam keberhasilan misi perdamaian tersebut. Perempuan dinilai memiliki keistimewaan dalam misi kemanusiaan terutama dengan adanya peran perempuan dalam konstruksi sosial di masyarakat, aspek psiko-sosial yang dimiliki oleh perempuan, kepekaan mereka terhadap lingkungan dan budaya dimana mereka berada, menjadi solusi yang mendukung penerimaan masyarakat terhadap *peacekeepers* perempuan.¹⁴

Indonesia terus berkomitmen untuk meningkatkan keterlibatan perempuan di misi perdamaian PBB. Selain dengan pembentukan resolusi 2538 yang diprakarsai oleh Indonesia, komitmen Indonesia dalam memajukan peran perempuan juga dapat dilihat dari peningkatan jumlah personel perempuan yang dikirimkan ke berbagai misi perdamaian. Perempuan pertama yang dikirimkan oleh Indonesia untuk menjadi *peacekeepers* dari PBB adalah Letnan Kolonel Ratih Pusparini. Beliau bertugas di Kongo, Afrika Tengah pada tahun 2008.¹⁵ Saat itu Letnan Kolonel Ratih Pusparini juga menjadi satu-satunya perempuan Indonesia yang bergabung dalam misi perdamaian PBB.

Pada tahun-tahun berikutnya keterlibatan personel perempuan Indonesia dalam misi perdamaian PBB terus mengalami peningkatan. Puncaknya pada tahun 2021 dimana Indonesia berhasil mengirimkan 190

¹⁴ Kementerian Luar Negeri Indonesia, "Peran Krusial Penjaga Perdamaian Perempuan, Sebagai Agen Perdamaian, Toleransi, dan Kemakmuran," diakses 26 Januari 2023, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/343/berita/peran-krusial-penjaga-perdamaian-perempuan-sebagai-agen-perdamaian-toleransi-dan-kemakmuran>.

¹⁵ Ibid.,

perempuan untuk bergabung dalam misi perdamaian PBB.¹⁶ Ini merupakan jumlah pasukan perempuan terbanyak yang pernah dikirimkan oleh Indonesia ke berbagai misi perdamaian di MINURSO, MINUSCA, MINUSMA, MONUSCO, UNAMID, UNIFIL, dan UNMISS.

Salah satu misi perdamaian dimana Indonesia masih secara aktif mengirimkan pasukannya termasuk pasukan perempuan adalah *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic* yang disingkat dengan MINUSCA. Misi ini merupakan salah satu misi perdamaian yang telah dijalankan oleh PBB di Republik Afrika Tengah sejak tahun 2014 dan masih berlangsung hingga saat ini. Terbentuknya MINUSCA merupakan salah satu bentuk respon PBB sebagai organisasi internasional dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Terlebih lagi karena Republik Afrika Tengah yang juga termasuk sebagai salah satu anggota PBB yang telah bergabung sejak kemerdekaannya pada tahun 1960.

Konflik di Republik Afrika Tengah telah berlangsung sejak kemerdekaan negara tersebut. Di Republik Afrika Tengah masih marak terjadi berbagai konflik internal negara seperti kudeta militer, ketidakstabilan politik, pemberontakan oleh berbagai kelompok tertentu,

¹⁶ United Nations Peacekeeping, "Summary of Contribution to UN Peacekeeping by Country, Mission and Post," diakses 27 Januari 2023, https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/03_country_an_mission_34_jan2021.pdf.

serta konflik lainnya yang melibatkan suku atau ras dan agama hingga akhirnya menyebabkan berbagai kasus pelanggaran HAM.¹⁷

Konflik di Republik Afrika Tengah semakin memanas pada tahun 2012 ketika terjadi kudeta terhadap Presiden Francois Bozize yang dilakukan oleh kelompok pemberontak bernama Seleka. Hingga tahun 2013 Seleka melakukan penyerangan ke berbagai kota di timur Republik Afrika Tengah yang meliputi area militer dan pertambangan.¹⁸ Seleka lalu berhasil menggulingkan kekuasaan dari Presiden Francois Bozize dan kedudukannya lalu digantikan oleh pemimpin mereka, Michel Djotodia.

Kondisi di Republik Afrika Tengah semakin memburuk selama masa pemerintahan Michel Djotodia. Hal ini dikarenakan Seleka yang merupakan kelompok pemberontakan yang beranggotakan Muslim diketahui melakukan berbagai pelanggaran HAM yang mengancam masyarakat. Sebagai respon terhadap kekuasaan Seleka yang semena-mena maka pada akhir 2013 terbentuklah Kelompok Anti-Balaka yang merupakan kelompok kristen yang melakukan perlawanan atas kekuasaan Seleka pada saat itu. Tak dapat dipungkiri bahwa kemudian konflik di negara ini yang awalnya merupakan konflik politik beralih menjadi konflik agama yang melibatkan kelompok muslim dan kristen.¹⁹

¹⁷ Amelia Setyawati, Helda Risman, dan Surryanto D.W, "MINUSCA on Its Mandate," *Technium Social Sciences Journal* Vol. 9, (2020): 441, doi: <https://dx.doi.org/10.47577/tssj.v9i1.919>.

¹⁸ Yannick Weyns, dkk, *Mapping Conflict Motives: the Central African Republic*, (Bangui: IPIS, 2014), 21

¹⁹ Titin Soekma H., "Intervensi Kemanusiaan Pbb dalam Menangani Pelanggaran HAM Di Republik Afrika Tengah Pada Tahun 2013-2014," *eJurnal Ilmu Hubungan Internasional* Vol. 4 No. 1, (Tahun 2016), 211

Selama terjadi bentrokan antara kelompok Seleka dan Anti-Balaka, Republik Afrika Tengah harus menghadapi kenyataan buruk setelah ribuan orang tewas di negaranya dan hampir separuh daripada penduduknya memerlukan bantuan kemanusiaan.²⁰ Bahkan hingga tahun 2022 lalu, baik kelompok Seleka maupun Anti-Balaka masih sering melancarkan serangan-serangan yang mengancam masyarakat dan para *peacekeepers* yang bertugas.

Perjanjian perdamaian antara pemerintah dengan kelompok pemberontak juga sudah pernah terbentuk pada 2013 dan 2019 lalu. Sayangnya, tak seluruhnya perjanjian dipatuhi oleh para pihak. Oleh karena itu, konflik ini akhirnya sulit untuk menemukan penyelesaiannya. Konflik ini juga menyebabkan banyak masyarakat terluka dan beberapa lainnya terpaksa mengungsi. Banyak perempuan dan anak-anak yang juga menjadi korban kekerasan fisik maupun seksual dari konflik ini. Munculnya berbagai konflik politik hingga konflik etnis di Republik Afrika Tengah menjadikannya mengalami ketidakstabilan negara yang berkepanjangan yang disertai dengan krisis kemanusiaan, keamanan, ekonomi hingga politik yang juga terus berlanjut di negara ini.

Berbagai upaya dilakukan oleh PBB untuk menstabilkan keadaan di negara ini. Salah satunya adalah dengan pembentukan MINUSCA yang didasari oleh resolusi DK PBB 2149. Dalam menjalankan misinya, para *peacekeepers* di MINUSCA diberikan tugas mulai dari melindungi

²⁰ MINUSCA, "About MINUSCA," diakses pada 10 Mei 2023, <https://minusca.unmissions.org/en/about>

masyarakat sipil, memberikan jasa baik dan dukungan terhadap proses perdamaian, termasuk pelaksanaan gencatan senjata dan APPR (*The Political Agreement for Peace and Reconciliation*), mempromosikan dan , melindungi hak asasi manusia, membantu pelaksanaan pemilu, reformasi sektor keamanan, perlucutan senjata, demobilisasi, reintegrasi, dan repatriasi, memberikan dukungan untuk penegakan keadilan dan hukum, membantu pengadilan pidana khusus, dan tugas tambahan lainnya.²¹

Hingga kini MINUSCA masih terus aktif dalam melakukan misinya. *Peacekeepers*nya berasal dari berbagai negara. Menurut data dari *United Nations Peacekeeping* pada Desember 2022 terdapat 16.730 anggota pasukan mulai dari militer, polisi, *staff officer* dan *expert on mission* yang terlibat dalam MINUSCA, dimana 1361 diantaranya merupakan perempuan.

Indonesia menjadi salah satu negara yang menyumbang kurang lebih 381 pasukan perdamaian dengan jumlah pasukan perempuan sebanyak 32 orang. Indonesia pertama kali mengirimkan Pasukan Garuda mereka ke MINUSCA pada tahun 2014 dengan berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2014 tentang Pasukan Garuda Satuan Tugas Kompi Zeni Tentara Nasional Indonesia Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa Di Republik Afrika Tengah. Selain pasukan TNI, Indonesia juga mengirimkan pasukan polisi mereka

²¹ MINUSCA, “About Mandate,” diakses pada 10 Mei 2023, <https://minusca.unmissions.org/en/mandate>

atau *Formed Police Unit* (FPU) yang dikenal sebagai Pasukan Garuda Bhayangkara sejak tahun 2019.

Pengiriman Pasukan Garuda Bhayangkara ke MINUSCA didasari atas permintaan PBB yang pada 23 Mei 2018 mengirimkan *Note Verbale* Nomor DPKO/OROLSI/2018/74 tentang permintaan kepada Pemerintah Indonesia untuk mengirimkan FPU di MINUSCA. Hingga akhirnya Indonesia mengirimkan FPU pertama mereka ke MINUSCA pada 27 Juni 2019 dengan jumlah pasukan sebanyak 140 orang dan 14 diantaranya merupakan anggota polisi perempuan. Pada tahun 2022 Indonesia berhasil mencetak angka keterlibatan FPU perempuan terbanyak yang dikirim ke MINUSCA dengan mengirimkan 25 polisi perempuan. Hingga saat ini Indonesia masih terus aktif dalam mengirimkan pasukan perdamaian mereka ke MINUSCA. Selain itu komitmen Indonesia untuk terus meningkatkan peran perempuan dalam misi perdamaian juga terlihat pada peningkatan jumlah perempuan yang dikirim ke MINUSCA setiap tahunnya.

Pada tahun-tahun sebelumnya, keterlibatan perempuan untuk Pasukan Garuda dalam misi MINUSCA nihil. Tetapi semenjak adanya komitmen Indonesia dalam meningkatkan jumlah *peacekeepers* perempuan mereka ke berbagai misi perdamaian membuat Indonesia akhirnya pada tahun 2019 mulai melibatkan perempuan dalam pasukannya. Hal ini juga didorong dengan keyakinan dari Pemerintah Indonesia bahwa perempuan dapat turut membantu menjalankan mandat MINUSCA

melalui keterlibatan mereka. Meski dalam nilai sosial di negara Indonesia perempuan sering dianggap tidak cocok bekerja dalam wilayah konflik karena terlalu berbahaya, namun para personel perempuan Pasukan Garuda MINUSCA berupaya untuk menunjukkan peran mereka dalam misi perdamaian. Terlebih lagi karena misi MINUSCA yang termasuk ke dalam salah satu misi perdamaian paling berbahaya di dunia. Selain itu, karena konflik di MINUSCA yang juga tak kunjung mereda maka melibatkan perempuan juga diharapkan akan menjadi salah satu solusi untuk membuat misi dan mandat di MINUSCA dapat berjalan lebih efektif. Penelitian ini ingin melihat sejauh mana peran Pasukan Garuda perempuan dalam membantu menjalankan misi kemanusiaan dan mandat PBB di MINUSCA.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan fenomena permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka fokus dari penelitian ini adalah: Bagaimana peran Pasukan Garuda perempuan dalam *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission In The Central African Republic* (MINUSCA)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui deskripsi peran Pasukan Garuda perempuan dalam *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission In The Central African Republic* (MINUSCA).

D. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian terdapat beberapa manfaat yang bisa diperoleh. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa hubungan internasional dan juga pembaca lainnya dalam memahami lebih lanjut tentang bagaimana peran para perempuan yang tergabung dalam Pasukan Garuda dalam membantu misi perdamaian PBB melalui MINUSCA. Besar harapan peneliti terhadap penelitian ini untuk dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dan dapat memperluas wawasan tentang pentingnya keterlibatan perempuan dalam misi perdamaian di dunia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat luas dalam melihat atau memahami peran perempuan sebagai pasukan perdamaian. Melalui penelitian ini, peneliti berharap agar peran perempuan dalam melaksanakan tugas misi pemeliharaan perdamaian dunia dapat di apresiasi.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk memperkuat posisi penelitian ini diantara penelitian lainnya yang sejenis, maka peneliti menelusuri penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan juga dapat membantu peneliti untuk mengetahui posisi

penelitian ini. Peneliti menjadi paham tentang persamaan dan perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa penelitian tersebut :

Pertama, penelitian oleh Rany Purnama Hadi dan Sartika Soesilowati yang berjudul “Peran Perempuan dalam Keamanan Pasukan Pemelihara Perdamaian Perempuan Indonesia dalam UNIFIL: Tantangan dan Peluang.” Penelitian berbentuk artikel yang dipublikasikan pada Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu terkait bagaimana perempuan Indonesia dapat berperan dalam misi perdamaian di Lebanon. Dalam misi UNIFIL, pasukan perempuan ditugaskan untuk melindungi dan membantu para perempuan serta anak-anak yang menjadi korban konflik untuk dapat hidup lebih baik. Selain itu perempuan juga diturunkan ke lapangan untuk menjaga wilayah, observasi pos penjagaan, melindungi warga sipil serta melakukan penyelidikan terhadap berbagai kasus kekerasan yang mungkin dilakukan oleh para pasukan perdamaian. Dalam penelitian ini digunakan pandangan feminis untuk menjadi pisau analisisnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran perempuan dalam misi UNIFIL sangat membantu PBB dalam efektifitas misi perdamaian di Lebanon dengan peran perempuan yang dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat khususnya perempuan dan anak-anak dalam menggali informasi kasus kekerasan atau pelecehan seksual yang mereka alami. Selain itu perempuan juga dinilai dapat

mempromosikan pentingnya kesetaraan gender khususnya dalam misi perdamaian. menjelaskan tentang tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh para perempuan Indonesia untuk dapat bergabung sebagai pasukan dalam misi perdamaian.²²

Kedua, penelitian oleh Satwika Paramasatya yang berjudul “Peran Penjaga Perdamaian Wanita dalam Proses Bina-Damai: Studi Kasus Operasi Perdamaian Monusco.” Penelitian ini berbentuk artikel yang dipublikasikan pada *Indonesian Journal of International Studies* (IJIS). Penelitian ini menjelaskan tentang pentingnya kesetaraan gender dan peran perempuan dalam misi perdamaian yang dilihat melalui beberapa parameter seperti keberhasilan pelaksanaan mandat, konsistensi pelaksanaan misi, DDR (*Disarmament, Demobilization, Reintegration*), dan CIMIC (*civil military coordination*) yang dilaksanakan selama misi berlangsung. Pelanggaran HAM berat yang terjadi di Kongo khususnya pelecehan seksual, pemerkosaan, kerja paksa dan penculikan menjadi salah satu tugas utama MONUSCO (United Nations Organization Stabilization Mission in The Democratic Republic of The Congo) untuk diatasi. Oleh karena itu, MONUSCO melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam misinya. Kesetaraan gender dalam misi perdamaian adalah suatu hal yang tak dapat dilupakan. Meskipun terdapat banyak kesulitan dalam mencapai kesetaraan tersebut.

²² Rany Purnama Hadi dan Sartika S, “Peran Perempuan dalam Keamanan Pasukan Pemelihara Perdamaian Perempuan Indonesia dalam UNIFIL: Tantangan dan Peluang,” *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* Vol. 31 No. 4 (2018), doi: <https://doi.org/10.20473/mkp.V31I42018.380-388>

Namun penelitiannya meyakini bahwa dengan meningkatkan peran perempuan dalam misi perdamaian dapat membantu untuk mengurangi hambatan dan tantangan untuk mencapai *peace building* dan meraih perdamaian hakiki.²³

Ketiga, penelitian oleh Zulvyanie Pilgrimmy Firohmatillah dan Arfin Sudirman yang berjudul “Peran Korps Wanita TNI sebagai Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB dalam *Humanitarian Assistance* di Lebanon” Penelitian ini berbentuk artikel yang dipublikasikan pada *Jurnal Indonesian Perspective*. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran dari TNI perempuan yang tergabung dalam anggota Pasukan Garuda dengan menggunakan konsep operasi perdamaian dan bantuan kemanusiaan sebagai acuan untuk mendeskripsikan peran perempuan di Lebanon. Penelitian ini lebih berfokus pada peran anggota TNI wanita dalam *Civil-Military Cooperations* yaitu dengan membentuk hubungan yang baik antara anggota militer dengan masyarakat sipil khususnya anak dan perempuan. Peran para Wanita TNI dalam misi di Lebanon lebih ditekankan pada bantuan kemanusiaan seperti membantu para perempuan dan anak-anak untuk dapat mengatasi rasa trauma mereka atas konflik yang terjadi, membantu memberikan bantuan kesehatan, dan menjadi contoh masyarakat untuk dapat mengembangkan potensi diri. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa perempuan dapat memberikan peran positif dalam misi perdamaian meskipun dengan tugas

²³ Satwika Paramasatya, “Peran Penjaga Perdamaian Wanita dalam Proses Bina-Damai: Studi Kasus Operasi Perdamaian Monusco,” *International Journal of International Studies* Vol.2 No. 1 (2015), doi: <https://doi.org/10.22146/globalsouth.28851>

yang berbeda dari para pasukan laki-laki seperti dalam proses merangkul masyarakat untuk pulih dari konflik.²⁴

Keempat, penelitian oleh Mumtazinur yang berjudul “Peran Perempuan dalam Proses Pemulihan Perdamaian di Burundi melalui Penerapan Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB.” Penelitian ini dirangkum berbentuk artikel yang dipublikasikan pada *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*. Dalam penelitian ini fokusnya adalah untuk menjelaskan tentang peran perempuan dalam United Nations Operation in Burundi (UNOB). UNOB menjadi salah satu misi perdamaian PBB yang berlangsung singkat namun dianggap sebagai *long-term success*. Keberhasilan daripada UNOB ini juga dianggap karena adanya pengaruh dari para perempuan Burundi dari masyarakat sipil maupun agen perdamaian. PBB mengadakan *Burundian Women’s Peace Conference* yang akhirnya menghasilkan *Arusha Peace Accord* yang berisikan tentang penolakan dan kekecewaan para perempuan Burundi terhadap lambatnya keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian, penetapan untuk melibatkan perempuan dalam pemerintahan dengan memberikan kuota sebanyak 30% untuk perempuan, meningkatkan proteksi terhadap perempuan dan anak-anak, mengintegrasikan hak-hak perempuan Burundi dalam proses perdamaian di Burundi termasuk penghapusan diskriminasi gender, memberikan jaminan hak-hak perempuan terhadap harta benda dan tanah serta warisan. Peran

²⁴ Zulvyanie Pilgrimmy Firohmatillah dan Arfin S, “Peran Korps Wanita TNI sebagai Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB dalam Humanitarian Assistance di Lebanon,” *Indonesian Perspective* Vol. 3 No. 2, (2019), <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/view/26699>

perempuan dalam misi perdamaian di Burundi baik perempuan yang berperan sebagai *peacekeepers* maupun masyarakat sipil di Burundi khususnya yang bertugas dalam bidang pemerintahan memberikan dampak yang sangat baik dalam membentuk perdamaian di Burundi. Selain itu perempuan juga dianggap memberikan kontribusi pada pemulihan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik pasca konflik di Burundi.²⁵

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Faradiba dan Anggun Puspitasari yang berjudul “Dampak Keterlibatan United Nations Women Peacekeepers pada Konflik di Darfur, Sudan (Periode 2013-2016)” Penelitian ini berbentuk artikel yang dipublikasikan pada *Jurnal Balcony*. Para perempuan di Darfur sering kali menjadi korban pemerkosaan. Menanggapi hal ini, maka di tingkatkanlah jumlah perempuan yang tergabung sebagai *peacekeepers* di Darfur. Mereka bertugas untuk melindungi para korban pelecehan dan kekerasan seksual, membangun kepercayaan dengan masyarakat, melakukan interaksi yang lebih diterima oleh masyarakat. Para *peacekeepers* perempuan di Darfur membentuk *The Women’s Protection Network*, sebuah program untuk menciptakan perlindungan di pengungsian dengan menyediakan wadah diskusi bagi para perempuan untuk membahas tentang pandangan para perempuan di Darfur terkait isu-isu perlindungan. Peran *peacekeepers* perempuan dinilai sangat efektif dalam membantu penyelesaian konflik di Darfur yang

²⁵ Mumtazinur, “Peran Perempuan dalam Proses Pemulihan Perdamaian di Burundi melalui Penerapan Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB,” *International Journal of Child and Gender Studies* Vol. 3 No. 1, (2017), <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/1951>

dibuktikan dengan pemberian perlindungan oleh para *peacekeepers* perempuan terhadap perempuan Darfur, interaksi yang baik dengan perempuan Darfur dengan membentuk *The Women's Protection Network*, serta keberhasilan mereka untuk mendorong perempuan agar dapat berperan aktif dalam perdamaian.²⁶

Keenam, penelitian oleh Yulia Fadillah, Jonni Mahroza, Harangan Sitorus dan Helda Risman yang berjudul "*The Role of Indonesia's Female Peacekeepers In United Nations Peacekeeping Operations to Promote Gender Equality.*" Penelitian ini berbentuk artikel yang dipublikasikan pada Jurnal Pertahanan oleh Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Perempuan dan anak-anak dalam wilayah konflik sangat rentan untuk mengalami eksploitasi dan kekerasan seksual terutama dengan adanya dominasi dari kekuatan maskulin. Indonesia menunjukkan komitmennya dengan menandatangani *Voluntary Compact to Eliminate Sexual Exploitation and Abuse* yang dibentuk oleh PBB. Perempuan pasukan perdamaian Indonesia memberikan peran mereka dengan melakukan pendekatan psiko-sosial dengan masyarakat setempat untuk menggali informasi tentang eksploitasi dan kekerasan seksual yang mereka alami, memberikan bantuan bagi para korban, membantu pemulihan dan mendorong masyarakat untuk dapat kembali pada kehidupan normalnya. Perempuan yang tergabung sebagai pasukan perdamaian dapat membantu

²⁶ Faradiba dan Anggun P, "Dampak Keterlibatan United Nations Women Peacekeepers pada Konflik di Darfur, Sudan (Periode 2013-2016)," *Balcony* Vol. 2 No.1, (2018), <https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/balcony/article/view/26>

rekonsiliasi konflik, membangun stabilitas politik dan sosial, serta membantu meningkatkan kepercayaan diri anak-anak dan perempuan sehingga dapat mengurangi kasus kekerasan dan kejahatan seksual yang terjadi selama konflik berlangsung.²⁷

Ketujuh, penelitian oleh Widya Astika Putri yang berjudul “Pengaruh Pendekatan Multidimensional Tentara Perempuan Dalam Operasi Perdamaian Unifil Di Lebanon” Penelitian ini berbentuk skripsi yang menjelaskan tentang pengaruh peran perempuan dalam misi perdamaian yang berdasarkan pada *multidimensional peacekeeping* yang merupakan sebuah pendekatan baru dalam *peacekeeping operations* yang tidak hanya melibatkan aspek militer tapi juga mencakup aspek kemanusiaan, gender, sosial, politik dan lain sebagainya untuk dapat meraih perdamaian yang berkelanjutan. Perempuan memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi misi perdamaian di Lebanon melalui beberapa dimensi yang meliputi, dimensi kemanusiaan dimana perempuan dinilai dapat memberikan bantuan dalam bidang kesehatan dan pemberdayaan anak. Dimensi militer dimana para pasukan perempuan memberikan pengaruh dalam membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Dan terakhir yaitu dimensi politik dimana personel perempuan berhasil dalam memberikan pengaruh dalam perlindungan akan warisan budaya Lebanon dengan bekerjasama bersama angkatan bersenjata Lebanon. Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah keterlibatan tentara perempuan

²⁷ Yulia Fadillah, dkk., “The Role of Indonesia’s Female Peacekeepers In United Nations Peacekeeping Operations to Promote Gender Equality,” Jurnal Pertahanan Vol. 6 No. 2, (2020), <https://jurnal.idu.ac.id/index.php/DefenseJournal/article/view/756>

memberikan pengaruh baik untuk misi perdamaian UNIFIL dengan peran aktif dan keahliannya dalam menjalankan misi perdamaian.²⁸

Kedelapan, Penelitian oleh Nurul Istiana Hasan dan Akbar Kurnia Putra yang berjudul “Peran Perempuan dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional” Penelitian ini berbentuk artikel yang dipublikasikan pada *Journal of International Law*. Permasalahan terkait kekerasan berbasis gender (*Gender Based Violence*) dan kekerasan seksual terkait konflik (*Conflict Related Sexual Violence*) kerap kali dialami oleh masyarakat khususnya perempuan dan anak-anak di wilayah konflik. Untuk mengatasi hal ini keterlibatan perempuan kemudian dinilai sebagai sebuah keharusan dalam misi perdamaian. Peran perempuan sebagai *peacekeepers* dapat membuat dampak positif bagi lingkungan penjaga perdamaian terlebih dalam memulihkan kepercayaan masyarakat yang dilanda konflik, mendukung peran perempuan dalam membangun perdamaian serta melindungi hak-hak perempuan.²⁹

Kesembilan, penelitian oleh Sabrina Karim dan Kyle Beardsley yang berjudul “*Explaining Sexual Exploitation and Abuse in Peacekeeping Missions: The Role of Female Peacekeepers and Gender Equality in Contributing Countries.*” Maraknya yang sering terjadi di wilayah konflik khususnya dalam PKO. Kasus eksploitasi dan pelecehan seksual atau

²⁸ Widya Astika Putri, “Pengaruh Pendekatan Multidimensional Tentara Perempuan Dalam Operasi Perdamaian Unifil Di Lebanon,” <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/123456789/241>

²⁹ Nurul Istiana H. dan Akbar Kurnia P., “Peran Perempuan dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional,” *Journal of International Law* Vol. 1 No. 2, (2020), <https://online-journal.unja.ac.id/Utipossidetis/article/view/10179>.

sexual exploitation and abuse (SEA) dalam PKO diketahui dapat juga melibatkan *peacekeepers* sebagai pelakunya. SEA kemudian dianggap sebagai sebuah hambatan untuk membangun perdamaian di wilayah konflik. Oleh karena itu, upaya pencegahan SEA dapat dilakukan dengan melibatkan perempuan sebagai *peacekeepers* atau menambah jumlah pasukan yang dibekali dengan pemahaman tentang kesetaraan gender. Dengan meningkatkan jumlah perempuan dalam *peacekeeping operations* dapat mengurangi jumlah kasus SEA. Namun hal yang lebih penting dari sekedar meningkatkan keterlibatan perempuan dalam PKO yaitu dengan memperketat perekrutan *peacekeepers*. Dalam proses perekrutan, para calon *peacekeepers* harus benar-benar melalui proses evaluasi yang ketat terlebih lagi untuk pemahaman mereka akan pentingnya kesetaraan gender.³⁰

Kesepuluh, penelitian oleh Anne Charoline Charles Braga yang berjudul “*Women In Peace Operations: Female Representation Within MINUSTAH’s Uniformed Personnel*” MINUSTAH adalah kepanjangan dari. Untuk misi perdamaian MINUSTAH (United Nations Stabilization Mission in Haiti) tingkat keterlibatan perempuan dinilai masih cukup rendah. Sedangkan permasalahan yang seringkali dihadapi adalah terkait eksploitasi dan pelecehan seksual. MINUSTAH merupakan misi perdamaian PBB dengan tingkat eksploitasi dan pelecehan seksual

³⁰ Sabrina Karim dan Kyle B., “Explaining Sexual Exploitation and Abuse in Peacekeeping Missions: The Role of Female Peacekeepers and Gender Equality in Contributing Countries,” *Journal of Peace Research* Vol. 53 No. 1, (2016), <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0022343315615506>

tertinggi. Namun peran pasukan perempuan di MINUSTAH masih belum dapat memberikan dampak yang signifikan bagi keberlangsungan PKO. Anggota perempuan yang tergabung dalam pasukan militer biasanya lebih sering ditugaskan untuk tugas-tugas pendukung. Sedangkan anggota polisi (FPU) perempuan ternyata tidak mendapatkan pelatihan yang pantas untuk berpartisipasi dalam misi perdamaian. Mereka juga kesulitan untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat setempat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa para *peacekeepers* perempuan di MINUSTAH belum dapat memberikan dampak baik yang signifikan untuk keberlangsungan misi di negara tersebut. Selain meningkatkan peran perempuan dalam misi perdamaian, juga diperlukan adanya pelatihan yang tepat bagi pasukan perempuan dan menempatkan perempuan di misi-misi penting terdepan sehingga dapat meningkatkan efektivitas misi perdamaian PBB.³¹

F. Argumentasi Utama

Argumentasi yang diajukan dalam penelitian ini adalah, keterlibatan perempuan sebagai *peacekeepers* dalam berbagai misi perdamaian merupakan sebuah hal harus ditingkatkan. Terlebih lagi dengan jumlah perempuan yang masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan pasukan laki-laki. Di Republik Afrika Tengah masih sering muncul berbagai serangan yang dilakukan oleh para kelompok

³¹ Anne Charoline C. B., "Women In Peace Operations: Female Representation Within MINUSTAH's Uniformed Personnel," https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/78076/Charles_Women_2020.pdf?sequence=3&isAllowed=y

pemberontak. Masyarakat sipil terlebih lagi para perempuan dan anak-anak menjadi korban yang paling merasakan dampak dari konflik tersebut. Melihat permasalahan ini, perempuan yang dianggap memiliki kemampuan lebih untuk dapat berbaur dengan masyarakat dibandingkan dengan personel laki-laki kemudian dinilai dapat membantu dalam melindungi mereka. Indonesia sebagai salah satu negara yang aktif menyuarakan kemajuan *peacekeepers* perempuan dan pentingnya peran mereka dalam misi perdamaian lalu berupaya untuk melibatkan perempuan pasukan mereka terutama dalam misi MINUSCA. Oleh karena itu, peneliti berargumen bahwa dalam pelaksanaan misi MINUSCA para perempuan juga dapat memberikan peran mereka untuk keberlangsungan misi perdamaian. Peran perempuan sangat diperlukan untuk membantu menjalankan misi kemanusiaan dan mandat PBB serta dapat membantu menangani dampak konflik yang dirasakan oleh masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Pertama, bab I merupakan pendahuluan dalam penelitian ini. Bab ini akan menjelaskan latar belakang dari masalah yang dibahas dalam penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan fokus penelitian, tujuan dan manfaat yang bisa didapat, tinjauan pustaka sebagai acuan penelitian, argumentasi utama oleh peneliti, lalu ditutup dengan sistematika pembahasan.

Kedua, bab II akan berisikan penjelasan tentang berbagai konsep atau kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman kerangka berpikir bagi peneliti dalam mengembangkan penelitian.

Ketiga, bab III menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian. Adapun bagian-bagian dalam bab ini meliputi pendekatan penelitian, level analisis dan subjek penelitian, lokasi dan waktu penelitian, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta teknik pemeriksaan keabsahan data

Keempat, pada bab IV akan disajikan paparan hasil penelitian yang akan dibagi menjadi 4 subbab yaitu, kondisi di Republik Afrika Tengah, upaya PBB dalam mengatasi konflik di Republik Afrika Tengah melalui misi perdamaian, Pasukan Garuda perempuan di Republik Afrika Tengah, peran Pasukan Garuda perempuan dalam MINUSCA. Dalam bab ini juga dijabarkan hasil analisis data yang menghasilkan jawaban daripada pertanyaan yang ada pada fokus penelitian.

Kelima, bab V merupakan bagian penutup yang akan berisikan kesimpulan dari hasil data yang telah dijabarkan serta dilanjutkan dengan saran yang bagi penelitian ini.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

Terdapat beberapa konsep yang relevan dengan topik penelitian ini. Konsep-konsep tersebut peneliti uraikan dibawah ini.

A. Peran

Bruce J. Biddle menyatakan bahwa peran adalah suatu hal yang selalu terjadi dalam kehidupan sehari-hari dimana setiap orang menampilkan perannya dengan cara yang berbeda-beda. Bruce J. Biddle mendefinisikan peran sebagai suatu karakteristik dari satu orang atau lebih yang dilakukan dalam suatu konteks.³² Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan suatu aspek dinamis yang berhubungan dengan suatu kedudukan atau status. Jika suatu individu berupaya untuk melaksanakan suatu hak dan kewajibannya, maka individu tersebut berarti tengah menjalankan suatu peranan.³³

Dengan berakar pada pemikiran Soekanto, dapat disimpulkan bahwa peran adalah hasil rangkaian dari perilaku tertentu yang dapat disebabkan oleh adanya jabatan-jabatan tertentu. Artinya, serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang disesuaikan dengan posisi sosial yang diberikan baik formal maupun informal. Sehingga, peran dapat didasarkan pada suatu ketentuan atau preskripsi dan harapan peran agar dapat memiliki tiga hal, yaitu:

³² Bruce J. Biddle, *Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors*, (New York: Academic Press, 2013), hlm 57-58

³³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 243.

1. Peran merupakan suatu konsep perilaku terkait tentang hal-hal yang dapat dilakukan oleh seorang individu dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Peran meliputi kegiatan yang dikorelasikan dengan suatu status, tempat, dan kedudukan suatu individu di masyarakat;
3. Peran dapat diartikan sebagai perilaku individu yang berperan penting bagi struktur sosial masyarakat.

Seperti yang telah diuraikan di atas, peranan adalah seorang individu yang tengah menjalankan hak dan kewajibannya. Veithzal Rivai dalam ini mengartikan bahwa peranan merupakan suatu perilaku yang telah diatur dan diharapkan oleh seseorang dalam menjabat posisi tertentu.³⁴ Bahkan, peranan sendiri dapat berperan untuk membimbing individu dalam hal berperilaku karena fungsi-fungsi dari peranan yang sangat beragam. Berikut akan dipaparkan fungsi peranan menurut J. Dwi Narwako³⁵:

1. Peranan dapat mempersatukan kelompok dan atau masyarakat;
2. Peranan dapat memberikan arah dalam proses sosialisasi;
3. Peranan merupakan bentuk pewarisan suatu tradisi, norma, nilai, ilmu pengetahuan, dan suatu kepercayaan;
4. Peranan dapat menghidupkan kembali suatu sistem kontrol dan pengendalian dalam kehidupan bermasyarakat.

³⁴ Veitzal Rivai Zainal, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2004), 148.

³⁵ J. Dwi Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan Edisi Ketiga*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 60.

Dalam konteks sosial, peranan sendiri tidak dapat diartikan secara mutlak atau multitafsir sehingga bergantung pada sudut pandang. Namun dalam pelaksanaannya, peranan sosial dalam ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu³⁶; 1) peranan yang disesuaikan atau *actual roles*, merupakan suatu cara dimana peranan itu seharusnya dijalankan secara lebih luwes atau mudah disesuaikan dengan kondisi tertentu; 2) peranan yang diharapkan atau *expected roles*, merupakan cara ideal dalam pelaksanaan peranan yang disesuaikan dengan penilaian dari masyarakat. Dalam jenis peranan ini, masyarakatlah yang menginginkan adanya peranan tersebut dan tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti perintah yang telah ditentukan. Untuk penelitian ini, Pasukan Garuda khususnya personel perempuan dituntut untuk turut memberikan peran mereka sesuai dengan statusnya sebagai *peacekeepers* dalam misi perdamaian yang dilaksanakan oleh PBB khususnya misi MINUSCA.

a. Peran Perempuan

Sejak jaman dahulu, peran perempuan seringkali dibatasi karena adanya suatu konstruksi sosial yang dibentuk oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu kiranya untuk mengetahui perbedaan dari jenis kelamin dan gender. Jenis kelamin merupakan sebuah perilaku, sifat struktural, dan sifat fungsional yang ditentukan oleh kromosom seks. Sehingga, jenis kelamin menentukan adanya perbedaan dan fungsi reproduksi yang kemudian digolongkan menjadi kaum laki-laki dan kaum perempuan.

³⁶ J. Dwi Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan Edisi Ketiga*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 60.

Sedangkan gender merupakan suatu perilaku, psikologis, dan kultur individu yang seringkali melekat atau diidentikan dengan suatu jenis kelamin.³⁷

Singkatnya, jenis kelamin ditentukan berdasarkan faktor biologis, sedangkan gender ditentukan secara kultural. Namun, pandangan yang telah melekat di masyarakat seringkali mengabaikan peranan perempuan meskipun banyak gerakan yang muncul untuk mematahkan pandangan negatif terhadap perempuan. Pada kenyataannya, kaum perempuan dianggap memiliki kemampuan fisik, derajat sosial, dan emosi serta pemikiran yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kaum laki-laki. Sehingga, anggapan ini mengakibatkan pelanggaran atas hak-hak perempuan termasuk hak dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa telah banyak gerakan yang muncul untuk melawan pandangan negatif terhadap kaum perempuan. Kini kaum perempuan di seluruh dunia berlomba-lomba untuk bersatu dan berupaya untuk meruntuhkan sekat batas antar gender.³⁸ Faktanya, selama 20 tahun terakhir telah terjadi peningkatan jumlah perempuan di instansi-instansi Pemerintahan, Militer, dan lain sebagainya. Seperti pada tahun 2018, secara global terjadi peningkatan 24,1% keanggotaan perempuan di parlemen atau jika dipersentasekan maka jumlah ini meningkat sebesar

³⁷ B.N Tormgrimson dan C.T. Minson, *Sex and Gender: What is the Difference?*, Journal of Applied Physiology 99, No. 33, (2005), 1.

³⁸ J. Zajda dan K. Freeman, *Globalization and Gender Equity: In Race, Ethnicity, and Gender in Education Cross-Cultural Understanding*, (Dordrecht: Springer Netherlands, 2009), 3-6.

13% daripada tahun-tahun sebelumnya.³⁹ Artinya, kaum perempuan sejatinya memiliki kapabilitas dan potensi yang sangat besar.

Sejalan dengan uraian tersebut, Retno L.P Marsudi selaku Menteri Luar Negeri Republik Indonesia mengatakan bahwa kaum perempuan memiliki peranan penting untuk menegakkan keamanan dan perdamaian dunia karena memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh kaum laki-laki. Kelebihan yang dimaksud di sini adalah insting keibuan yang secara alami sehingga dapat menciptakan perdamaian dengan penuh kasih tulus dan kepedulian karena rasa empati yang tinggi.⁴⁰ Dalam seminar dengan tema *“The Role of Women Negotiators and Mediators in the Maintenance of Regional Peace and Security”*, Retno L.P Marsudi juga turut menyampaikan bahwa saat ini Indonesia akan terus berupaya untuk mewujudkan peran dan kontribusi perempuan sebagai agen perdamaian dalam tatanan global.⁴¹

Indonesia hingga saat ini terus berkomitmen untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dunia yang sesuai dengan amanat dari alinea ke-IV pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia percaya bahwa kehadiran perempuan sebagai penjaga perdamaian akan menyumbang kontribusi positif bagi keberhasilan misi

³⁹ Elyzabeth Nasution dkk., “Evolusi Peran Perempuan dalam Politik di Era Globalisasi,” UPH Journal of International Relations, diakses pada 21 Juli 2023, https://www.researchgate.net/publication/359727398_Evolusi_Peran_Perempuan_dalam_Politik_d_i_Era_Globalisasi/link/624b96018068956f3c6b3266/download

⁴⁰ Ghita Intan, “Peran Penting Perempuan Tegakkan Perdamaian Dunia,” diakses pada 21 Juli 2023, <https://www.voaindonesia.com/a/peran-penting-perempuan-tegakkan-perdamaian-dunia/4866661.html>

⁴¹ Ini Diplomasi, “Indonesia Suarakan Peran dan Kontribusi Perempuan sebagai Agen Perdamaian,” diakses pada 21 Juli 2023, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/1439/berita/indonesia-sua%20rakan-peran-dan-kontribusi-perempuan-sebagai-agen-perdamaian>

perdamaian karena peran perempuan jika dikonstruksikan secara sosial memiliki hak-hak yang sangat istimewa dalam menunjang misi kemanusiaan.

b. Peran Perempuan dalam MINUSCA

Pada tahun 2019, dari keseluruhan total penjaga perdamaian (*peacekeepers*) yang berjumlah 95.000, kaum perempuan hanya berkisar 10,8% yang merupakan polisi dan 4,7% merupakan kontingen militer. Meskipun demikian, Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam ini terus mendorong keterlibatan perempuan dengan mengharuskan negara-negara anggota PBB untuk meningkatkan penempatan perempuan dalam militer dan kepolisian.

Perempuan pemelihara perdamaian merupakan anggota misi penjaga pemeliharaan perdamaian PBB termasuk salah satunya MINUSCA, memiliki berbagai peran dan tugas yang sangatlah penting. Sebagai *peacekeepers*, peran perempuan dalam ini memainkan beberapa peranan penting yaitu:

- 1) Membantu memulihkan kepercayaan masyarakat yang trauma akan suatu konflik.
- 2) Melindungi masyarakat khususnya perempuan dan anak-anak korban kekerasan seksual
- 3) Membantu para gerilyawan perempuan selama proses reintegrasi dan demobilisasi

- 4) Berperan sebagai panutan agar dapat menginspirasi para perempuan korban konflik agar dapat melakukan apa saja sesuai haknya.
- 5) Berperan untuk dalam melindungi warga sipil, mencegah konflik, mengurangi kekerasan, memberikan bantuan kepada otoritas pemerintah negara konflik untuk menciptakan perdamaian di negaranya.⁴²

Dengan demikian, pasukan perdamaian perempuan telah mewujudkan adanya pemberdayaan perempuan. Dengan diterjunkannya pasukan perempuan dalam misi perdamaian ini, diharapkan bagi para pasukan ini untuk dapat memberikan dukungan keamanan dan politik serta pembangunan perdamaian untuk negara-negara yang sedang berada dalam masa transisi dari konflik menuju perdamaian.⁴³

Oleh karena itu, untuk mengetahui tentang peran yang diberikan oleh personel perempuan dalam Pasukan Garuda untuk misi MINUSCA, maka peneliti menggunakan konsep peran yang telah dijelaskan sebagai sebuah alat analisis untuk data yang diperoleh. Konsep ini akan berpengaruh untuk mengetahui apakah personel Pasukan Garuda perempuan telah melakukan peranan mereka sebagai *peacekeepers* dalam misi MINUSCA.

⁴² United Nations Peacekeeping, "What We Do," diakses pada 18 Juli 2023, <https://peacekeeping.un.org/en/what-we-do>

⁴³ United Nations Peacekeeping, "What is Peacekeeping," diakses pada 18 Juli 2023, <https://peacekeeping.un.org/en/what-is-peacekeeping>

B. Misi Pemeliharaan Perdamaian (*Peacekeeping Operations*)

Peacekeeping operations atau PKO merupakan salah satu alat yang dikembangkan oleh PBB dalam menjaga keamanan dan perdamaian di dunia yang membantu dalam pengawasan dan penyelesaian terhadap konflik bersenjata yang terjadi di suatu wilayah atau negara.⁴⁴ PKO kemudian dianggap sebagai sebuah solusi untuk memelihara perdamaian di dunia khususnya bagi wilayah yang mengalami konflik berkepanjangan.

Konsep *peacekeeping* pertama kali muncul pada 2 November 1956. Saat itu, Lester B. Pearson, mantan Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri Kanada memberikan pidatonya di Majelis Umum PBB. Dalam pidato tersebut ia menyampaikan pentingnya untuk menjaga kesepakatan gencatan senjata pada konflik krisis terusan Suez yang melibatkan Mesir dan Israel dengan membentuk “*a truly international peace and police force*”. Pearson meyakini bahwa PBB perlu untuk membentuk *peacekeeping force*.⁴⁵ Pidato ini kemudian berdampak pada pembentukan *United Nations Emergency Force* (UNEF) pada 1957.

Sebelumnya PBB telah membentuk *United Nations Truce Supervision Organization* (UNTSO) sebagai PKO pertama mereka pada tahun 1948. Namun, pasukan yang dikirimkan pada saat itu tidak melibatkan pasukan bersenjata dan hanya bertugas untuk melakukan pemantauan, pelaporan,

⁴⁴ Leonardo F. Hutabarat, “Diplomasi Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB,” *Jurnal Pertahanan* Vol. 6 No. 2, (2016): 79, doi: <http://dx.doi.org/10.33172/jpbh.v6i2.308>.

⁴⁵ Leonardo F. Hutabarat, “Indonesia dan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB,” *Majalah Legiun Veteran*, Januari, 2016, diakses pada 07 Maret 2023, https://www.academia.edu/70861274/Indonesia_dan_Pasukan_Penjaga_Perdamaian_PBB

dan pengembangan kepercayaan diri masyarakat.⁴⁶ Sedangkan UNEF menjadi PKO pertama PBB dengan melibatkan pasukan militer dan polisi bersenjata.

PBB mendefinisikan PKO sebagai sebuah kegiatan atau operasi yang dibentuk oleh PBB yang didalamnya melibatkan pasukan militer tetapi tidak disertai dengan kekuatan penegak hukum yang bertujuan untuk membantu memulihkan dan menjaga perdamaian dan keamanan internasional di wilayah yang berkonflik.⁴⁷ Namun seiring berjalannya waktu, PKO kemudian berevolusi dengan tidak hanya melibatkan pasukan militer saja tetapi juga melibatkan polisi serta masyarakat sipil yang saling bekerjasama dalam menciptakan perdamaian di wilayah yang berkonflik.

Dalam pelaksanaannya, PKO melibatkan berbagai pasukan militer, polisi maupun masyarakat sipil yang biasa disebut dengan *peacekeepers*. Para *peacekeepers* ini berasal dari berbagai negara didunia yang kemudian saling bekerjasama untuk menciptakan keamanan dan perdamaian di wilayah konflik. Hingga saat ini terdapat 121 negara yang berkontribusi dalam mengirimkan *peacekeepers* nya. Salah satu negara yang mengirim *peacekeepers* terbanyak adalah Bangladesh yang menyumbang kurang lebih dari 7017 *peacekeepers* ke berbagai PKO. Dengan angka tersebut

⁴⁶ United Nations Peacekeeping, "Our History," diakses 07 Maret 2023, <https://peacekeeping.un.org/en/our-history>

⁴⁷ Nigel D. White, *Keeping the Peace: the United Nations and the maintenance of International Peace and Security*, (Manchester: Manchester University Press, 1997), 207.

maka Bangladesh berhasil menempati posisi pertama sebagai negara penyumbang *peacekeepers* terbanyak di dunia.⁴⁸

Pelaksanaan PKO berada dibawah tanggung jawab Department of Peacekeeping Operations (DPKO) dan dilaksanakan sesuai dengan mandat Dewan Keamanan PBB. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Piagam PBB dimana Dewan Keamanan PBB memiliki tanggung jawab utama dalam segala hal yang berkaitan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.⁴⁹ Sejak awal pembentukannya, PBB telah menetapkan 3 prinsip dasar yang harus dipatuhi dalam merencanakan dan melaksanakan PKO yaitu:⁵⁰

1. *Consent of the parties*

Hal yang paling utama harus diperhatikan sebelum melaksanakan PKO adalah diperlukan adanya persetujuan dari para pihak yang berkonflik. Hal ini karena keterbukaan dan penerimaan para pihak yang berkonflik terhadap keterlibatan PKO menjadi sangat penting agar tidak menimbulkan konflik yang lebih luas kedepannya.

2. *Impartiality*

⁴⁸ United Nations Peacekeeping, "Contribution of Uniformed Personnel to UN by Country and Personnel Type," diakses 11 Februari 2023, https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/01_contributions_to_un_peacekeeping_operations_by_country_and_post_55_october_22.pdf

⁴⁹ United Nations Peacekeeping, "Mandates and Legal Basis for Peacekeeping," diakses 12 Februari 2023, <https://peacekeeping.un.org/en/mandates-and-legal-basis-peacekeeping>

⁵⁰ United Nations Department of Peacekeeping Operation, *United Nations Peacekeeping Operation*, 31-35.

Dalam melaksanakan PKO diperlukan prinsip *impartiality* atau ketidakberpihakan kepada salah satu pihak yang berkonflik. Sehingga diperlukan PKO dan *peacekeepers* yang dapat bersikap adil dan tidak memihak saat melaksanakan misi dan mandat yang diberikan oleh PBB.

3. *Non-use of force except in self-defense and defense of the mandate*

PBB telah melarang penggunaan kekuatan atau kekerasan selama PKO berlangsung sejak tahun 1956. Namun terdapat pengecualian dimana penggunaan kekuatan atau kekerasan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan daripada Dewan Keamanan PBB. Penggunaan kekuatan hanya digunakan untuk membela diri, pencegahan terhadap berbagai upaya yang dapat menghalangi proses perdamaian atau mempertahankan keberlangsungan mandat yang diberikan.

PKO telah dianggap sebagai salah satu alat paling efektif yang dimiliki oleh PBB dalam mewujudkan perdamaian internasional dengan cara membantu negara yang berkonflik untuk dapat meraih perdamaian. PKO dinilai efektif karena beberapa faktor seperti memiliki legitimasi, pembagian tugas dan beban yang baik, serta kemampuannya untuk dapat menyatukan dan mempertahankan *peacekeepers* mereka diseluruh dunia

serta mengintegrasikan mereka dengan pasukan sipil dari wilayah yang berkonflik.⁵¹

Pada awalnya PKO hanya bertugas untuk mengawasi proses gencatan senjata antara para pihak yang berkonflik. Namun seiring berjalannya waktu PKO kemudian mengalami perkembangan. Pelaksanaan PKO kini juga meliputi beberapa hal lain, seperti perlindungan terhadap masyarakat yang ada di wilayah konflik, melakukan pelucutan senjata terhadap para pelaku konflik, melindungi hak asasi manusia, mempromosikan penegakan hukum, mendukung pelaksanaan pemilihan umum di wilayah yang berkonflik dengan bebas dan adil, meminimalkan adanya resiko ranjau darat mengingat hal ini dapat membahayakan masyarakat, serta melakukan banyak hal lainnya sesuai dengan keadaan daripada wilayah konflik.⁵² Sehingga dapat dikatakan bahwa para *peacekeepers* yang tergabung dalam PKO memiliki tanggung jawab terhadap penjagaan keamanan dan perdamaian serta perlindungan terhadap masyarakat yang seringkali menjadi korban akan kekerasan konflik.

C. Pasukan Garuda

Peacekeepers yang berasal dari Indonesia seringkali dikenal dengan sebutan Pasukan Garuda atau Kontingen Garuda (KONGA).

⁵¹ Leonardo F.Hutabarat, "Indonesian Participation in the UN Peacekeeping as an Instrument of Foreign Policy: Challenges and Opportunities," *Global and Strategies* Vol. 8 No. 2, (2014): 185, <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jgs45b74e5c14full.pdf>

⁵² United Nations Peacekeeping, "Our Peacekeepers," diakses pada 12 Februari 2023, <https://peacekeeping.un.org/en/our-peacekeepers>

Pasukan Garuda pertama kali dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soekarno tepatnya pada tahun 1956.⁵³ Namun, Pasukan Garuda pertama baru dikirimkan pada tahun 1957 ke Sinai, Mesir, untuk berpartisipasi dalam misi *United Nations Emergency Force* (UNEF) dengan jumlah pasukan sebanyak 559 orang. Berselang 2 tahun kemudian Indonesia kemudian kembali mengirimkan 1074 pasukan untuk mengikuti misi *United Nations Operation in the Congo* (ONUC).⁵⁴ Hingga kini Indonesia masih konsisten mengirimkan *peacekeepers* mereka untuk bergabung dalam berbagai PKO setiap tahunnya.

Pasukan Garuda menjadi salah satu aspek penting bagi politik luar negeri Indonesia. Mengingat hal ini merupakan salah satu bagian daripada kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Keterlibatan Indonesia dalam perdamaian dunia juga tidak terlepas dari adanya Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:⁵⁵

“...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk ikut

⁵³ Kompas.com, “Pasukan Garuda, Pasukan Perdamaian Indonesia,” Kompas.com, 12 April, 2022, diakses 07 Maret 2023, <https://www.kompas.com/stori/read/2022/04/12/120000279/kontingen-garuda-pasukan-perdamaian-indonesia?page=all>

⁵⁴ Kementerian Luar Negeri Indonesia, “Indonesia and the Peacekeeping Mission,” diakses 14 Februari 2023, https://kemlu.go.id/portal/en/read/91/halaman_list_lainnya/indonesia-and-the-united-nations-peacekeeping-mission

⁵⁵ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, alinea 4

serta dalam mewujudkan perdamaian dunia yang dibuktikan dengan keterlibatan Indonesia dalam mengirimkan *peacekeepers* ke berbagai misi perdamaian.

Indonesia menjadi salah satu negara yang berada pada posisi ke-8 sebagai negara penyumbang pasukan perdamaian terbesar. Prestasi ini tidak terlepas dari komitmen Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia salah satunya dengan cara mencanangkan *Vision 4000 Peacekeepers* oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2012 yang bertujuan untuk menempatkan Indonesia pada posisi 10 besar negara penyumbang pasukan perdamaian. Visi ini kemudian didukung dengan pembentukan *Roadmap Vision 4000 Peacekeepers 2015-2019* melalui Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2015 yang menjelaskan tentang acuan strategi dalam mencapai 4000 *peacekeepers* dalam kurun waktu 2015-2019. Visi ini kemudian tercapai pada tahun 2018 dimana Indonesia berhasil menyumbangkan 3545 *peacekeepers* termasuk 94 personel perempuan. Dengan jumlah ini kemudian dapat memosisikan Indonesia pada peringkat ke 7 sebagai negara penyumbang pasukan perdamaian terbesar didunia.⁵⁶

Sejak awal dikirimkannya Pasukan Garuda pertama sampai dengan hari ini, Indonesia diperkirakan telah mengirimkan lebih dari 47.000

⁵⁶ Kementerian Luar Negeri Indonesia, *Presidensi Indonesia pada Dewan Keamanan PBB Mei 2019*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019), 41

pasukan mereka ke berbagai misi perdamaian PBB.⁵⁷ Indonesia telah berpartisipasi dalam beberapa misi perdamaian PBB di berbagai negara seperti, Mesir, Iran, Irak, Kuwait, Yugoslavia, Kroasia, Kamboja, Haiti, Kongo, Namibia, Somalia, Mozambik, Sudan, Darfur, Lebanon, Bosnia-Herzegovina, Georgia, Makedonia, Syria, Tajikistan, dan Sierra Leone.

Pada awalnya Pasukan Garuda yang dikirimkan oleh Indonesia hanya melibatkan pasukan militer atau pasukan infanteri. Hingga kemudian pada tahun 1980 an Indonesia juga mulai melibatkan pengamat militer dan polisi, anggota polisi, serta masyarakat sipil yang ahli di bidang misi perdamaian PBB sebagai anggota *peacekeepers* mereka.⁵⁸ Dari 12 misi perdamaian yang aktif saat ini, terdapat 2686 personel Pasukan Garuda yang terlibat dalam berbagai misi tersebut.

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2015, Pasukan Garuda dapat terdiri dari pasukan TNI, Kepolisian Republik Indonesia, atau masyarakat sipil yang tergabung dalam suatu pasukan atau perorangan.⁵⁹ Nantinya, saat menjadi *peacekeepers* mereka akan menyesuaikan tugasnya sesuai dengan mandat misi yang telah diberikan oleh PBB.

⁵⁷ Kementerian Luar Negeri Indonesia, “Kementerian Luar Negeri RI Luncurkan Buku Indonesia dan Rekam Jejak di Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB,” diakses 19 Januari 2023, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2329/berita/kementerian-luar-negeri-ri-luncurkan-buku-indonesia-dan-rekam-jejak-di-misi-pemeliharaan-perdamaian-pbb>

⁵⁸ Dewi Fortuna Anwar, “Indonesia's Peacekeeping Operation: History, Practice, and Future Trend” in *Asia-Pacific Nations in International Peace Support and Stability Operations*. Asia Today, ed. Aoi, C., Heng, YK. (New York: Palgrave Macmillan, 2014), 190.

⁵⁹ Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2015 Tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian.

Untuk bergabung dengan Pasukan Garuda, terdapat beberapa tes seleksi yang harus dilalui oleh para pendaftar. Beberapa di antaranya seperti tes kesehatan jasmani, tes kejiwaan, tes bahasa Inggris, tes komputer dan tes mengemudi dan menembak. Lalu saat dinyatakan lulus, para kandidat pasukan Garuda terpilih selanjutnya akan melakukan pelatihan untuk mempersiapkan diri dalam bertugas di misi perdamaian.

Saat ini, Pasukan Garuda masih didominasi oleh pasukan militer atau TNI. Oleh karena itu, tahun 2007 pemerintah Indonesia membentuk Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI (PMPP TNI) yang bertugas untuk melakukan perencanaan dan menyiapkan personel TNI dalam berbagai penugasan, pelatihan dan pendidikan yang berhubungan dengan tugas pemeliharaan perdamaian PBB baik di dalam maupun di luar negeri.⁶⁰

Dalam penugasannya, pasukan TNI yang terlibat dalam Pasukan Garuda dapat berasal dari angkatan darat, laut dan udara. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 menyatakan bahwa TNI dapat bekerja dalam pasukan yang terdiri dari prajurit TNI maupun secara perseorangan yang didalamnya dapat meliputi ahli militer yang bertugas sebagai pengamat militer, *military staff officer*, penasehat militer, perwira penghubung, perwira staf di Markas Besar PBB, komandan misi, komandan sektor dan kepala staf umum misi pada misi

⁶⁰ Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI, "Profil PMPP TNI," diakses 14 Februari 2023, <https://ppid.tni.mil.id/view/32435571/profil-pmpp-tni.html>

perdamaian PBB.⁶¹ Selain melibatkan anggota TNI, Pasukan Garuda juga melibatkan anggota polisi sebagai *Formed Police Unit* (FPU). Pasukan Garuda yang terdiri dari anggota polisi baru dikirimkan untuk bergabung dengan PKO pada tahun 1989 pada misi United Nations Transition Assistance Group (UNTAG) di Namibia.⁶²

Pasukan Garuda yang dikirimkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri yang biasa dikenal dengan sebutan Pasukan Garuda Bhayangkara. Dalam proses perekrutan dan pelaksanaannya dilakukan langsung oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia melalui Divisi Hubungan Internasional Polri.

Sejak dikirimnya Pasukan Garuda pertama oleh Indonesia pada tahun 1957 hingga pada hari ini Indonesia masih aktif berkontribusi dalam mengirimkan Pasukan Garuda mereka ke berbagai misi perdamaian dunia. Dari 12 PKO yang masih dijalankan oleh PBB, Pasukan Garuda setidaknya terlibat pada 8 PKO yang berlangsung saat ini yaitu UNIFIL, MONUSCO, MINUSCA, UNMISS, MINUSMA, UNISFA, MINURSO dan UNFICYP.

D. Pasukan Garuda Perempuan

Indonesia pertama kali mengirimkan pasukan garuda perempuan pada tahun 2008. Pada saat itu, Letnan Kolonel Ratih Pusparini yang

⁶¹ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengiriman Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia

⁶² POLRI, "Lepas Pasukan Perdamaian PBB, Kapolri: Selalu Pedomani Tribrata dan Catur Prasetya," diakses 07 Maret 2023, <https://polri.go.id/berita-polri/1539>

merupakan seorang Perwira TNI Angkatan Udara, terpilih sebagai satu-satunya perempuan yang bergabung dengan Pasukan Garuda untuk melaksanakan misi perdamaian di Kongo, Afrika Tengah. Dalam melaksanakan misi perdamaian, Ratih diberikan tugas sebagai *military observer*.⁶³ Semenjak saat itu, keterlibatan perempuan Indonesia dalam misi perdamaian meningkat setiap tahunnya.

Pada tahun 2019-2020 Indonesia kembali terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Selama masa keanggotaannya, Indonesia selalu aktif menyuarakan tentang pentingnya peran perempuan dalam misi perdamaian. Hal ini dibuktikan dengan Indonesia yang menetapkan salah satu isu prioritasnya yaitu meningkatkan peran perempuan dalam proses perdamaian.⁶⁴ Kegigihan Indonesia dalam menyuarakan ini kemudian membuahkan hasil yang membanggakan. Pada Agustus 2020 pada masa presidensinya di DK PBB, Indonesia berhasil mengesahkan Resolusi 2538 yang merupakan resolusi pertama DK PBB yang membahas tentang personel perempuan dalam misi perdamaian.

Dalam wilayah konflik, perempuan dan anak-anak sering kali menjadi korban. Oleh karena itu, Indonesia menginginkan adanya pemberdayaan perempuan agar dapat terlibat dalam upaya pembentukan

⁶³ Unair News, *Ratih Pusparini, Alumnus Pembawa Misi Perdamaian di Negara Konflik*, diakses pada 9 Maret 2023, <https://news.unair.ac.id/2017/04/27/ratih-pusparini-alumnus-pembawa-misi-perdamaian-di-negara-konflik/>

⁶⁴ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Keanggotaan Indonesia pada DK PBB," diakses 9 Maret 2023, https://kemlu.go.id/portal/id/read/147/halaman_list_lainnya/keanggotaan-indonesia-pada-dk-pbb

perdamaian sebagai agen perdamaian.⁶⁵ Indonesia kemudian juga percaya bahwa dengan melibatkan perempuan dalam misi perdamaian dapat memberikan kontribusi bagi keberhasilan suatu misi. Perempuan dinilai memiliki keistimewaan karena mereka memiliki kelebihan dalam aspek psiko-sosial yang dapat membantu dalam misi kemanusiaan untuk mewujudkan perdamaian.⁶⁶ Oleh karena itu, Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam misi perdamaian dengan meningkatkan jumlah perempuan dalam Pasukan Garuda.

Indonesia secara aktif mengirimkan pasukan perdamaian mereka ke 8 dari 12 misi perdamaian. Namun untuk pasukan perempuan, Indonesia hanya mengirimkan mereka ke 7 misi perdamaian yang dilaksanakan di Sahara Barat, Republik Afrika Tengah, Mali, Kongo, Siprus, Lebanon, dan Republik Sudan Selatan.

Berdasarkan data PBB pada bulan November 2022, perempuan Indonesia yang terlibat dalam misi perdamaian berjumlah 159 orang atau kurang lebih hanya 6% dari jumlah keseluruhan Pasukan Garuda yang bertugas saat itu. Angka ini termasuk jumlah yang cukup sedikit jika dibandingkan dengan pasukan laki-laki yang hampir lebih dari 2000 orang. Bahkan jumlah perempuan Indonesia yang terlibat dalam misi perdamaian tidak pernah mencapai lebih dari 200 orang.

⁶⁵ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Presidensi Indonesia pada Dewan Keamanan PBB Mei 2019*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu, 2019), 139.

⁶⁶ Kementerian Luar Negeri Indonesia, "Peran Krusial Penjaga Perdamaian Perempuan, Sebagai Agen Perdamaian, Toleransi, dan Kemakmuran," 9 Maret 2023, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/343/berita/peran-krusial-penjaga-perdamaian-perempuan-sebagai-agen-perdamaian-toleransi-dan-kemakmuran>

Selama puluhan tahun, PKO telah didominasi oleh laki-laki. Dalam pelaksanaannya, PKO biasanya melibatkan pasukan militer maupun polisi yang lekat dengan stereotip maskulin. Pada akhirnya, *peacekeepers* kemudian dianggap sebagai sebuah pekerjaan untuk laki-laki. Hal ini lalu menjadi sebuah hambatan untuk meningkatkan peran perempuan dalam misi perdamaian termasuk perempuan Indonesia.

Untuk bergabung dengan Pasukan Garuda, baik laki-laki maupun perempuan harus mengikuti serangkaian tes seleksi yang diadakan oleh TNI maupun Polri. Tes yang dilaksanakan pun sama dan tidak ada perbedaan diantara keduanya. Namun, terdapat satu hal tambahan yang harus dilewati oleh perempuan yaitu izin dari keluarga.

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih lekat dengan budaya patriarki yang memosisikan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Perempuan seringkali dianggap hanya perlu melakukan pekerjaan domestik. Oleh karena itu, jika seorang perempuan ingin menjadi bagian dari Pasukan Garuda tak cukup hanya dengan mengikuti tes saja. Tetapi mereka juga perlu untuk melampirkan izin tertulis dari suami jika ingin bergabung dengan Pasukan Garuda. Hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia tidak ingin melanggar nilai sosial di masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai seorang yang memiliki peran besar

dalam keluarga terutama jika telah memiliki anak.⁶⁷ Sehingga hal ini dapat menghambat peran dan keterlibatan perempuan dalam Pasukan Garuda.

Di setiap PKO, tugas yang dijalankan oleh Pasukan Garuda tentu saja berbeda-beda tergantung kondisi wilayahnya. Namun bagi Pasukan Garuda perempuan, mereka memiliki satu tugas tambahan di setiap misinya. Tugas tersebut adalah mengatasi permasalahan sosial yang ada di masyarakat terutama terkait kasus kekerasan berbasis gender. Terlebih lagi karena selama proses pelatihan, Pasukan Garuda perempuan telah dibekali dengan kemampuan *gender-responsive* dan kemampuan untuk membangun komunitas (*community building*).⁶⁸ Sehingga, mereka tentu memiliki kemampuan lebih untuk dapat berbaur dengan masyarakat. Hal ini penting untuk mengatasi permasalahan gender dan membantu menciptakan perdamaian di wilayah konflik.

E. MINUSCA

MINUSCA merupakan salah satu PKO yang dibentuk oleh PBB pada tahun 2014 untuk membantu membentuk perdamaian di Republik Afrika Tengah. Negara ini telah mengalami berbagai pergolakan setelah kemerdekaannya pada tahun 1960. Berbagai kasus pemberontakan dan kudeta terus-menerus terjadi. Karena dinilai sudah terlalu berbahaya bahkan telah mengancam keamanan dan HAM masyarakat, maka PBB

⁶⁷ Fitriani Bintang Timur, "The Tales of Three Asian Countries: How Indonesia, India and the Philippines Recruited Women for UN Peacekeeping Missions," *Jurnal Politik Internasional* Vol. 18 No.1 (2016): 61, <https://scholarhub.ui.ac.id/global/vol18/iss1/3/>.

⁶⁸ FISIP Universitas Indonesia, "Menjadi Perempuan Lebih Berbahaya dibandingkan Menjadi Pasukan Perdamaian," diakses 11 Maret 2023, <https://fisip.ui.ac.id/menjadi-perempuan-lebih-berbahaya-dibandingkan-menjadi-pasukan-perdamaian/>

kemudian memutuskan untuk membentuk MINUSCA guna membantu meredakan konflik berkepanjangan yang terjadi di negara ini.

Sebelum membentuk MINUSCA, pada 2010 PBB telah mendirikan *The UN Integrated Peacebuilding Office in the Central African Republic* (BINUCA) sebagai upaya untuk mengkonsolidasi perdamaian dan memperkuat lembaga demokrasi di Republik Afrika Tengah.⁶⁹ Kemudian pada tahun 2013 Dewan Keamanan PBB juga telah mengeluarkan resolusi DK PBB 2127 yang mendukung dan menyetujui usulan Uni Afrika untuk membentuk MISCA atau *The African-led International Support Mission in Central Africa* sebagai upaya untuk menstabilkan konflik kudeta yang terjadi pada saat itu dengan melibatkan lebih dari 5000 pasukan militer dari berbagai negara di Afrika selama pelaksanaannya.⁷⁰

Namun kehadiran BINUCA dan MISCA pun ternyata tidak memberikan dampak signifikan terhadap konflik yang terjadi di Republik Afrika Tengah. Hingga akhirnya pada 15 September tahun 2014 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi DK PBB 2149 yang berisikan tentang pembentukan MINUSCA dan pengalihan kewenangan MISCA kepada MINUSCA dengan prioritas utama misinya adalah untuk melindungi masyarakat sipil.⁷¹

⁶⁹ MINUSCA, “About MINUSCA,” diakses 15 Februari 2023, <https://minusca.unmissions.org/en/about>

⁷⁰ MISCA, “MISCA Establishment,” diakses 15 Februari 2023, <http://misca.peaceau.org/en/page/113-establishment-1>

⁷¹ United Nations Peacekeeping, “Mandated to Protect Civilians and Support Transition Processes in the Central African Republic,” diakses 15 Februari 2023, <https://peacekeeping.un.org/en/mission/minusca>

Melalui resolusi DK PBB 2149 dalam pelaksanaannya MINUSCA diberikan beberapa mandat sebagai berikut:

- 1) Perlindungan terhadap masyarakat sipil
- 2) Memberikan dukungan terhadap otoritas setempat untuk keberhasilan proses transisi termasuk dukungan dalam aspek politik
- 3) Memberikan fasilitas terhadap bantuan kemanusiaan
- 4) Memberikan perlindungan bagi keamanan dan kebebasan PBB termasuk perlindungan personel, instalasi, peralatan dan barang kepemilikan PBB di wilayah konflik
- 5) Memajukan, mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia
- 6) Memberikan dukungan untuk menegakkan keadilan dan penegakan hukum
- 7) *Disarmament, Demobilization, Reintegration (DDR) and Repatriation (DDRR)*

Pada awal pelaksanaannya sesuai dengan yang mandat Dewan Keamanan melalui resolusi 2194, pasukan yang diturunkan untuk bergabung dengan MINUSCA adalah sebanyak 10.000 personel militer yang meliputi 240 pengamat militer (*military observer*) dan 200 petugas staf (*staff officers*) serta melibatkan 1.800 personel polisi yang didalamnya meliputi 1.400 personel yang tergabung dalam pasukan unit polisi (*formed police unit*) dan 400 polisi yang bekerja secara perorangan (*individual*

police officers). Hingga Desember 2022, berdasarkan data dari United Nations Peacekeeping, terdapat sebanyak 16.730 anggota pasukan mulai dari militer, polisi, *staff officer* dan *expert on mission* yang kini aktif terlibat dalam pelaksanaan mandat MINUSCA. Hingga saat ini pelaksanaan MINUSCA telah berlangsung selama kurang lebih 8 tahun dan masih terus aktif dalam melaksanakan misinya. Melalui resolusi 2659, Dewan Keamanan PBB secara resmi telah memperpanjang masa berlaku daripada mandat pelaksanaan MINUSCA hingga 15 November 2023.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memiliki dua tujuan utama yaitu untuk menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*) atau menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*) guna memahami berbagai fenomena sosial melalui wawancara terhadap partisipan, observasi, kajian dokumen, dan data pelengkap lainnya.⁷² Oleh karena itu, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci dan mendalam terkait fenomena atau permasalahan tentang peran Pasukan Garuda perempuan dalam MINUSCA.

Salah satu karakteristik daripada penelitian kualitatif dalam penelitian adalah bersifat deskriptif. Sehingga penelitian ini berisikan data-data yang berupa kata-kata atau narasi. Dalam penelitian kualitatif kata-kata atau narasi menjadi sangat penting dalam menjelaskan dan menyebarluaskan hasil penemuan penelitian.⁷³ Dengan menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, maka hasil temuan penelitian ini bersifat jelas dan rinci dalam pembahasannya.

⁷² Sandu Siyoto dan M. Ali S., *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 14

⁷³ Robert C. Bogdan dan Sari Knopp B., *Qualitative Research for Education: an introduction to theories and methods*, (United States of America: Pearson Education, 2007), 5.

B. Subjek Penelitian dan Level Analisis

Dalam sebuah penelitian seorang peneliti perlu untuk mengetahui terkait bidang yang akan diteliti. Oleh karena itu diperlukan tingkat analisis yang digunakan untuk menentukan fokus yang akan dijelaskan dalam penelitian. Mochtar Mas'oeed menjelaskan setidaknya terdapat 5 tingkat analisis yang dapat digunakan dalam penelitian yaitu; 1) individu; 2) kelompok individu; 3) negara-bangsa; 4) kelompok negara-negara; 5) sistem internasional.⁷⁴

Penelitian ini membahas tentang peran Pasukan Garuda yang bertugas di salah satu Misi Perdamaian PBB. Oleh karena itu, level analisis dari penelitian ini dapat dikategorikan kedalam level kelompok individu. Hal ini karena dalam penelitian ini para perempuan yang tergabung dalam Pasukan Garuda menjadi subjek dalam penelitiannya untuk mengetahui sejauh mana peran mereka saat bertugas dalam misi perdamaian di Republik Afrika Tengah atau misi MINUSCA.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini sebaiknya dilakukan di Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Pertahanan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas Pasukan Garuda. Namun, karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, maka peneliti memutuskan untuk tidak melakukan penelitian secara langsung ke kementerian tersebut. Namun, peneliti tetap berupaya untuk mendapatkan data-data yang diperlukan melalui internet

⁷⁴ Mohtar Mas'oeed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES, 1990), 46

yang bersumber langsung dari *website* Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, PBB, TNI, dan POLRI.

Untuk mengetahui langsung bagaimana peran Pasukan Garuda Perempuan di MINUSCA, peneliti lalu mencari para anggota perempuannya yang terlibat langsung dalam misi tersebut. Peneliti berhasil menghubungi salah satu anggota Pasukan Garuda perempuan yang berdomisili di Batam dan bersedia peneliti wawancara. Karena jarak antara peneliti dengan informan yang cukup jauh, maka proses wawancara dilakukan secara daring melalui Zoom dengan durasi selama kurang lebih satu jam yang dilaksanakan pada 06 Juni 2023. Peneliti bermaksud mendengar pengalaman mereka secara langsung. Sehingga data yang akan didapatkan juga akan bersifat lebih mendalam dan detail karena berasal dari sumber utama. Waktu penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu selama 2 bulan yaitu pada Mei-Juni 2023.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan penggalian data dari sumber primer maupun sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini peneliti peroleh melalui cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁷⁵ Peneliti melakukan pencarian informan dengan menelusuri unggahan foto, video, serta kolom pengikut dari akun Instagram @peacekeeperspolri. Peneliti kemudian menemukan

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 85

akun Instagram dari salah satu polisi wanita yang tergabung sebagai anggota Pasukan Garuda untuk MINUSCA yaitu Ibu Raden Anggie (@radengie) yang merupakan pasukan FPU 1 MINUSCA. Beliau telah dinilai memenuhi kriteria sebagai informan karena memiliki pengalaman langsung terlibat dalam MINUSCA.

Selanjutnya peneliti juga mengumpulkan data sekunder yang didapatkan dari penelusuran data daring yang berupa buku, artikel, berita, dan informasi yang didapatkan dari *website* pemerintahan seperti kemlu.go.id, kemhan.go.id, ppid.tni.mil.id, polri.go.id, dan peacekeeping.un.org yang data dan informasinya selalu diperbaharui secara berkala. Peneliti lalu juga mencantumkan tanggal dan waktu saat pengambilan data melalui internet serta saat pelaksanaan wawancara bersama dengan informan untuk penelitian ini. Dalam melakukan pengumpulan data terkait PKO hingga peran perempuan dalam misi perdamaian secara daring, peneliti berupaya untuk menyeleksi data yang tersedia dan menggunakan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya untuk mempertahankan keakuratan data yang digunakan dalam penelitian ini.

E. Teknik Sampling

Dalam penelitian, penarikan sampel harus dilakukan dengan pertimbangan bahwa sampel tersebut dapat mewakili gambaran dari

populasi yang akan diteliti.⁷⁶ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penarikan sampel dengan menentukan beberapa kriteria khusus untuk mendapatkan hasil data yang dapat menggambarkan perilaku populasi dengan akurat. Proses penarikan data seperti ini biasanya disebut dengan teknik *nonprobability sampling* dimana tidak seluruh populasi dapat terpilih menjadi sampel untuk penelitian.⁷⁷ Secara khusus teknik penarikan yang digunakan peneliti ini juga termasuk dalam teknik *purposive sampling* karena adanya beberapa pertimbangan peneliti dalam memilih informan. Untuk pemilihan sampel atau kriteria informan dalam penelitian ini adalah para perempuan yang tergabung sebagai anggota Pasukan Garuda dan pernah menjalankan tugas selama satu tahun dalam misi MINUSCA. Peneliti berhasil menemukan 14 orang yang memenuhi kriteria tersebut. Namun peneliti hanya berhasil melakukan wawancara dengan satu orang informan saja. Hal ini karena kesibukan pekerjaan dari informan lain seperti sedang dalam masa pelatihan untuk misi perdamaian lain atau karena kesibukan pekerjaan akhirnya membuat komunikasi antara peneliti dengan informan akhirnya terhambat.

F. Tahap-tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melalui berbagai tahap. Menurut Moleong, tahapan penelitian terbagi menjadi 3 bagian sebagai berikut:⁷⁸

⁷⁶ Sandu Suyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 56

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 84

⁷⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 127-148

1) Tahap pra lapangan

Pada tahapan pertama ini peneliti mengawalinya dengan menentukan masalah atau topik yang akan diteliti. Dilanjutkan dengan melakukan riset pendahuluan terkait topik penelitian tersebut. Peneliti melakukan ini dengan mencari sumber-sumber informasi yang relevan dari internet yang dapat dijamin kebenarannya. Lalu, peneliti membuat dan mengajukan judul penelitian yang kemudian disetujui oleh dosen pembimbing. Setelah itu, peneliti menyusun proposal penelitian hingga akhirnya diujikan dalam seminar proposal.

2) Tahap pengerjaan

Tahap pengerjaan merupakan tahapan yang penting dalam penelitian. Pada tahap ini, peneliti mencari dan mengumpulkan data-data yang dapat menjawab fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui internet. Peneliti mencari buku, artikel, berita, dan informasi dari sumber terpercaya seperti dari *website* Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, PBB, TNI, dan POLRI yang berisikan tentang informasi terkait PKO hingga peran perempuan dalam misi perdamaian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain dari internet, peneliti juga mendapat data dengan melakukan wawancara bersama dengan dua informan yang telah disebutkan sebelumnya.

3) Tahap analisis data

Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan dari berbagai sumber, peneliti kemudian melakukan analisis data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan memeriksa kebenaran data yang telah didapatkan dari internet, buku, jurnal dan wawancara. Peneliti lalu memeriksa kecocokan data yang ditemukan termasuk membandingkan data dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, PBB, TNI, dan POLRI yang ada di internet dengan hasil wawancara peneliti, sehingga memperkuat tingkat validitas dari data tersebut.

G. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data yang dibutuhkan maka peneliti melanjutkan pada tahap analisis data. Menganut pada Sugiyono, dalam tahap analisis data peneliti berupaya untuk mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang telah didapatkan melalui wawancara bersama salah satu anggota Pasukan Garuda perempuan, observasi, dan dokumentasi. Data-data tersebut lalu dikelompokkan kedalam berbagai kategori dan dijabarkan ke dalam unit-unit sehingga akan membentuk sebuah pola yang mempermudah peneliti untuk memilih data penting yang akan digunakan dan mudah dipahami.⁷⁹ Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan mengacu pada pemikiran Miles dan Huberman yang membagi analisis data kedalam 3 tahapan yaitu:⁸⁰

⁷⁹ Ibid., 244

⁸⁰ Matthew B. Miles, dkk., *Qualitative Data Analysis: a Methods Sourcebook*, (California: SAGE Publications, 2014), 31

1) Kondensasi data (*data condensation*)

Kondensasi data merupakan sebuah proses untuk memilih, memfokuskan dan menyederhanakan data-data yang telah didapatkan sebelumnya. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data-data yang berfokus pada pembahasan terkait PKO dan pentingnya keterlibatan maupun peran perempuan dalam misi perdamaian yang didapatkan melalui wawancara bersama informan. Selain itu, data-data yang didapatkan dari hasil penelusuran di internet dari *website* Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, PBB, TNI, POLRI, serta sumber lain yang berisikan tentang segala informasi yang berkaitan dengan topik pembahasan, dimana data-datanya diperbaharui secara berkala juga akan disederhanakan dalam tahapan ini. Proses penyeleksian ini dilakukan untuk membantu peneliti agar mendapatkan data-data penting yang berhubungan dengan topik penelitian tentang peran Pasukan Garuda Perempuan dalam MINUSCA dan menyisihkan data lain yang tidak relevan.

2) Penyajian data (*data display*)

Setelah data di sederhakan sebelumnya, tahap selanjutnya adalah melakukan *data display* atau penyajian data. Melalui penyajian data ini nantinya akan membantu memudahkan peneliti untuk memahami hasil data yang ada dan tindakan yang harus dilakukan selanjutnya. Dalam penelitian ini data yang disajikan

akan berupa teks. Namun peneliti juga menggunakan gambar, grafik, bagan, ataupun matriks yang dapat mempermudah pembaca untuk memahami data secara jelas. Data yang didapatkan melalui wawancara bersama informan disajikan dalam bentuk transkrip. Peneliti membuat coding untuk mempermudah proses pengelompokan data mulai dari proses awal perekrutan, pelatihan, pemberangkatan, kegiatan masa tugas di Republik Afrika Tengah, hingga kembali ke tanah air dari informan yang merupakan anggota perempuan dari Pasukan Garuda yang bertugas dalam MINUSCA.

3) Penarikan kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusion*)

Tahapan terakhir yang dilakukan adalah melakukan penarikan kesimpulan. Setelah mengumpulkan data, melakukan kondensasi data, kemudian dilanjutkan dengan penyajian data, maka peneliti kemudian menarik kesimpulan dari data yang telah dijabarkan sebelumnya. Setelah mendapatkan kesimpulan, peneliti lalu melakukan verifikasi terhadap kebenaran daripada hasil kesimpulan tersebut. Sehingga kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini bersifat valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Peneliti perlu untuk menguji keabsahan daripada data-data yang telah didapatkan sebelumnya. Hal ini dilakukan agar penelitian ini menyajikan data-data yang valid dan teruji kebenarannya. Untuk menguji

keabsahan data dalam penelitian ini peneliti melakukan prose triangulasi. Triangulasi merupakan sebuah proses dimana peneliti melakukan pengecekan kembali terhadap data yang telah didapatkan sebelumnya dari berbagai sumber.⁸¹ Dalam penelitian ini proses triangulasi dilakukan dengan melakukan pengecekan dan mencocokkan data yang didapatkan saat dokumentasi, wawancara, serta informasi melalui sosial media subjek penelitian. Dengan triangulasi peneliti dapat mengetahui apakah data-data tersebut sesuai dengan kebenaran yang ada di lapangan. Sehingga kesimpulan yang dibuat untuk menjawab fokus penelitian nantinya akan sesuai kebenarannya dengan data-data yang ada.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁸¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 274

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Di Republik Afrika Tengah

Republik Afrika Tengah merupakan sebuah negara yang sempat mengalami masa-masa penjajahan oleh Prancis sebelum akhirnya mengumumkan kemerdekaannya pada tahun 1960. Meski berhasil mendirikan pemerintahan negaranya sendiri, negara ini nyatanya masih harus menghadapi krisis konflik sejak awal kemerdekaannya tersebut. Republik Afrika Tengah terus mengalami konflik internal yang tak berkesudahan. Terlebih karena maraknya kudeta yang dilakukan oleh berbagai kelompok pemberontak yang terjadi hampir di setiap pergantian pemimpin. Masyarakat disana meyakini jika cara terbaik untuk berkuasa adalah dengan cara melakukan pemberontakan atau kudeta. Hingga kini, sudah terjadi 5 kali kudeta terhadap pemimpin di Republik Afrika Tengah.⁸² Salah satu konflik pemberontakan yang menjadi puncak krisis di Republik Afrika Tengah adalah konflik yang terjadi antara kelompok Seleka dan Anti-Balaka.

Pemberontakan Seleka bermula pada tahun 2012, para pemberontak kala itu melakukan kudeta terhadap Presiden Francois Bozize yang tengah menjabat pada saat itu. Francois Bozize memimpin Republik Afrika Tengah selama 10 tahun mulai dari 2003-2013. Namun, karena adanya kelemahan politik dan ekonomi selama masa

⁸² M. Beninga Paul-Crescent, dkk. *Persistence Of The Crisis In The Central African Republic: Understanding In Order To Act*, (Kamerun: Friedrich Ebert Stiftung, 2018): 7

pemerintahannya maka terjadilah pemberontakan dari berbagai kelompok termasuk Seleka. Pada akhir tahun 2012 sampai dengan 2013 Seleka telah melakukan penyerangan ke berbagai kota di timur Republik Afrika Tengah yang meliputi area militer dan pertambangan.⁸³

Akibat aksi pemberontakan yang tak kunjung usai maka pada 11 Januari 2013 dibentuklah Perjanjian Perdamaian antara Pemerintah Republik Afrika Tengah dengan Seleka yang dilaksanakan di kota Libreville. Dalam Perjanjian Perdamaian ini, Presiden Francois Bozize disepakati akan tetap menjabat sampai dengan akhir masa jabatannya pada tahun 2016 dan kelompok Seleka berhak untuk menunjuk Perdana Menteri dalam masa pemerintahan tersebut serta melakukan gencatan senjata.⁸⁴ Namun, Pemerintah dinilai tidak mematuhi perjanjian tersebut sehingga mengakibatkan Seleka kembali melakukan pemberontakan. Hingga akhirnya pada 24 Maret 2013 Seleka berhasil menguasai ibu kota dan beberapa hari kemudian mereka berhasil menguasai seluruh negara.⁸⁵

Sebanyak 450 warga yang tinggal di ibu kota Bangui dan 160 warga diluar ibu kota dinyatakan tewas dan 159.000 lainnya terpaksa harus meninggalkan rumah mereka secara paksa karena kudeta ini.⁸⁶

⁸³ Yannick Weyns, dkk, *Mapping Conflict Motives: the Central African Republic*, (Bangui: IPIS, 2014): 21.

⁸⁴ VOA Indonesia, "Pemerintah, Pemberontak Afrika Tengah Sepakat Bentuk Pemerintahan Bersatu," diakses pada 14 Februari 2023, <https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-pemberontak-car-sepakat-bentuk-pemerintahan-bersatu/1582449.html>

⁸⁵ Robert Klosowicz, "Central African Republic:Portrait of A Collapsed State After The Last Rebellion," POLITEJA Vol. 42 No. 3, (Tahun 2016): 40, <https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/2152/1847>

⁸⁶ United Nations News, "Over 600 people killed, 159,000 displaced in Central African Republic – UN," diakses pada 30 Mei 2023, <https://news.un.org/en/story/2013/12/457782>

Keberhasilan Seleka dalam menguasai negara sekaligus menandai akhir dari masa pemerintahan Presiden Francois Bozize.

Kepemimpinan Republik Afrika Tengah kemudian digantikan oleh Pemimpin Seleka yaitu Michel Djotodia. Namun, kondisi negara semakin memburuk selama masa pemerintahan Michel Djotodia. Hal ini karena Seleka yang merupakan kelompok pemberontakan yang beranggotakan muslim diketahui melakukan berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengancam masyarakat. Kekuasaan Seleka yang semena-mena akhirnya menyebabkan Kelompok Anti-Balaka yang merupakan kelompok Kristen melakukan perlawanan atas kekuasaan Seleka pada akhir 2013. Tak dapat dipungkiri bahwa kemudian konflik di Republik Afrika Tengah yang awalnya merupakan konflik politik beralih menjadi konflik saudara dan agama yang turut melibatkan kelompok muslim dan kristen.⁸⁷

Kurangnya kepercayaan antara pemerintah, kelompok pemberontak dan masyarakat di Republik Afrika Tengah membuat konflik semakin rumit. Berbagai perjanjian perdamaian juga telah terbentuk antara pemerintah dengan para kelompok pemberontak. Setelah perjanjian perdamaian yang gagal dipatuhi pada 2013 lalu, pemerintah Republik Afrika Tengah bersama dengan kelompok pemberontak kembali membentuk perjanjian perdamaian baru pada tahun 2019 yang berisikan

⁸⁷ Titin Soekma H., "Intervensi Kemanusiaan Pbb dalam Menangani Pelanggaran HAM Di Republik Afrika Tengah Pada Tahun 2013-2014," eJurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol. 4 No. 1, (Tahun 2016): 211, <http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1813>

tentang komitmen kedua belah pihak untuk mengakhiri sumber-sumber krisis yang merusak kehidupan negara dan masyarakat.⁸⁸

Namun, perjanjian perdamaian ini ternyata tidak membawa dampak yang signifikan dalam meraih perdamaian di Republik Afrika Tengah. Selama terjadi bentrokan antara kelompok Seleka dan Anti-Balaka, pemberontakan ini menyebabkan ribuan orang tewas dan hampir separuh daripada penduduk Republik Afrika Tengah memerlukan bantuan kemanusiaan karena kondisi di Republik Afrika semakin mengkhawatirkan.⁸⁹ Karena konflik yang berkepanjangan, Republik Afrika Tengah mengalami krisis diberbagai bidang. Dalam bidang politik, negara ini mengalami krisis demokrasi yang melemah.

Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin negaranya membuat berbagai aksi pemberontakan terus menerus terjadi. Segala hal yang berhubungan dengan kekuasaan dan proses politik juga dapat menjadi pemicu konflik. Perlu diketahui bahwa beberapa Presiden yang memimpin Republik Afrika Tengah merupakan ketua dari kelompok pemberontak yang berhasil menggulingkan pemerintahan sebelumnya. Pemimpin politik di negara ini dianggap tidak mampu menangani perubahan politik dan krisis yang terjadi di negara yang dipimpinnya. Budaya korupsi, kegagalan dalam mengadili para pelaku kejahatan yang menandai lemahnya hukum,

⁸⁸ ReliefWeb by UNOCHA, "Political Agreement for Peace and Reconciliation in the Central African Republic, February 2019 (S/2019/145)," diakses pada 18 Juni 2023, <https://reliefweb.int/report/central-african-republic/political-agreement-peace-and-reconciliation-central-african>

⁸⁹ MINUSCA, "About MINUSCA," diakses pada 15 Juni 2023, <https://minusca.unmissions.org/en/about>

dan kurangnya transparansi dalam pemerintahan semakin memperparah krisis politik di Republik Afrika Tengah. Hal ini lalu berdampak pada lemahnya sistem politik yang tidak mampu untuk melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya dalam menyediakan layanan publik yang dibutuhkan oleh warga negaranya.⁹⁰ Keadaan ini kemudian membuat kelompok pemberontak terus bermunculan.

Hingga kini, berbagai serangan dari beberapa kelompok pemberontak bersenjata juga masih terus terjadi. Tak hanya mengancam negara, serangan kelompok pemberontak ini juga mengancam keamanan warga Republik Afrika Tengah. Salah satu contohnya adalah serangan yang dilakukan oleh kelompok pemberontak bersenjata 3R (*Return, Reclamation, Rehabilitation*). Pada bulan Mei 2019 silam, pemberontak bersenjata ini dilaporkan telah melakukan serangan di Ouham Pendé dan menewaskan 46 orang warga sipil. Sebelum melakukan pemberontakan, 3R bersama dengan 13 kelompok pemberontak lain menandatangani perjanjian perdamaian bersama dengan pemerintah Republik Afrika Tengah pada bulan Februari. Selanjutnya pada bulan Maret, komandan dari 3R bahkan ditunjuk sebagai penasihat militer untuk perdana menteri melalui keputusan presiden.⁹¹ Namun, upaya pemerintah Republik Afrika Tengah ternyata tidak berdampak signifikan dalam membangun perdamaian di negaranya yang dibuktikan dengan kelompok 3R yang

⁹⁰ M. Beninga Paul-Crescent, dkk. *Persistence Of The Crisis In The Central African Republic: Understanding In Order To Act*, (Kamerun: Friedrich Ebert Stiftung, 2018): 9

⁹¹ Human Rights Watch, "Central African Republic: Armed Group Kills 46 Civilians," diakses pada 30 Mei 2023, <https://www.hrw.org/news/2019/07/18/central-african-republic-armed-group-kills-46-civilians>

melanggar perjanjian dan masih meluncurkan serangan yang mengancam masyarakat sipil.

Selain masyarakat sipil, kelompok pemberontak bersenjata juga menyerang para pihak yang bekerja dan mendukung pemerintah seperti yang terjadi terhadap pasukan bersenjata negara atau Central African Armed Forces (FACA). Pada Februari awal tahun ini, pangkalan FACA telah diserang secara brutal oleh kelompok pemberontak bersenjata. Karena serangan ini beberapa personel FACA meninggal dan kurang lebih 20 personel dijadikan tawanan.⁹² Sementara itu, pada akhir tahun 2020, 3 orang *peacekeepers* yang bertugas untuk misi perdamaian di Republik Afrika Tengah dilaporkan tewas saat terjadi bentrokan antara pemerintah dengan kelompok pemberontak.⁹³

Pada Oktober 2021, pemerintah Republik Afrika Tengah kembali membuat kesepakatan perdamaian bersama dengan kelompok pemberontak dan mengumumkan pernyataan gencatan senjata secara sepihak. Namun sebagian kelompok pemberontak sepertinya tidak mendukung adanya perdamaian di antara mereka. Pada 6-13 Desember 2021, kelompok pemberontak yang sebelumnya merupakan anggota dari kelompok Anti-Balaka kembali melakukan serangan di Desa Boyo yang menewaskan 20 orang warga sipil. Selain itu, terdapat 5 orang perempuan

⁹² United Nations Human Rights, "UN expert condemns attack on Central African Armed Forces in Sikikédé, calls armed rebels "enemies of the peace," diakses pada 29 Mei 2023, <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/03/un-expert-condemns-attack-central-african-armed-forces-sikikede-calls-armed>

⁹³ BBC News, "UN peacekeepers killed in Central African Republic on eve of election," diakses pada 29 Mei 2023, <https://www.bbc.com/news/world-africa-55451763>

dan anak perempuan dilaporkan menjadi korban pemerkosaan. Pemukiman warga juga menjadi sasaran serangan dari kelompok pemberontak dengan membakar dan menjarah kurang lebih 547 rumah. Akibat dari pada serangan ini, lebih dari 1000 orang warga terpaksa harus mengungsi.⁹⁴

Kelompok pemberontak di Republik Afrika Tengah juga terus-menerus melakukan berbagai pelanggaran yang menyangkut tentang hukum dan hak asasi manusia disana. Sejauh ini, berbagai kelompok pemberontak telah melakukan berbagai aksi serangan yang membahayakan keamanan masyarakat, perusakan lingkungan dan harta benda warga, penculikan dan penganiayaan, serta pemerkosaan kepada perempuan dan anak-anak. Para perempuan dan anak-anak yang tinggal di Republik Afrika Tengah terus menjadi korban kekerasan seksual terkait konflik dan kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender yang terjadi di Republik Afrika Tengah dapat meliputi kekerasan fisik dan psikologis, pemerkosaan, pernikahan dini, sunat pada perempuan norma sosial dan budaya yang tidak memihak perempuan juga termasuk didalamnya.⁹⁵ Hingga kini setiap jam diperkirakan akan ada 3 perempuan

⁹⁴ MINUSCA, "Central African Republic: UN Reports Detail Serious Violation, Some Possibly Amounting to War Crimes and Crimes Against Humanity," diakses pada 29 Mei 2023, <https://minusca.unmissions.org/en/central-african-republic-un-reports-detail-serious-violations-some-possibly-amounting-war-crimes-and>

⁹⁵ UNOCHA, "Central African Republic Surviving gender-based violence," diakses pada 02 Juni 2023, <https://reports.unocha.org/en/country/car/card/4yzspZJ54C/>

atau anak perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender di Republik Afrika Tengah.⁹⁶

Bahkan kasus pelecehan seksual tidak hanya dialami oleh warga pribumi afrika, namun juga dialami oleh *peacekeepers* yang bertugas di sana. Ibu Raden Anggie yang merupakan bagian dari FPU 1 MINUSCA berbagi cerita jika beliau dan anggota pasukan perempuan lainnya sering dipandang oleh warga di sana dengan pandangan yang kurang sedap dan mengarah pada pikiran negatif. Untuk menghindari hal tersebut, para *peacekeepers* perempuan biasanya menggunakan pakaian yang tertutup mulai dari kepala hingga ujung kaki selama bertugas.⁹⁷

Berdasarkan data dari PBB melalui MINUSCA terdapat banyak laporan pelanggaran kekerasan seksual akibat konflik yang didominasi oleh 2 kelompok pemberontak di Republik Afrika Tengah, yaitu *Popular Front for the Rebirth of Central African Republic* (FPRC) dan *Union for Peace in the Central African Republic* (UPC) yang berafiliasi dengan *The Coalition of Patriots for Change* (CPC). Dalam kurun waktu 2 tahun sejak Desember 2020 hingga Maret 2022 telah dilaporkan terjadi 226 kasus kekerasan seksual berbasis gender kepada 245 korban—146 diantaranya adalah perempuan dan 99 lainnya merupakan anak-anak. Selain itu, juga dilaporkan adanya 193 kasus pemerkosaan yang dialami oleh 216 korban. 5 kasus percobaan pemerkosaan dan 18 kasus perbudakan seksual yang

⁹⁶ UNOCHA, “Gender-based violence: a scourge with devastating consequences,” diakses pada 02 Juni 2023, <https://reports.unocha.org/en/country/car/card/4FOp0JIGKg/>

⁹⁷ Raden Anggie, Wawancara oleh Penulis dengan Salah Satu Pasukan FPU 1 MINUSCA, 06 Juni 2023.

menimpa 24 orang. Jumlah tersebut hanyalah jumlah korban di dua kota di Republik Afrika Tengah.⁹⁸ Hal ini membuktikan betapa mengkhawatirkannya kondisi di Republik Afrika Tengah bagi masyarakat sipil yang tidak bersalah.

Masyarakat di Republik Afrika Tengah telah terbiasa hidup dalam kondisi rawan konflik dan tidak stabil. Setiap harinya di Republik Afrika Tengah selalu ada kemungkinan terjadi konflik atau perang saudara antar masyarakat. Bahkan setiap keluarga di sana memiliki senjata yang mereka simpan di tempat tinggalnya masing-masing. Sehingga tak heran jika mereka terbiasa menggunakan dan mendengar suara senjata-senjata yang simpang siur disekitar mereka. Mirisnya, anak-anak yang tinggal di sana juga sudah terbiasa dengan masyarakat yang sering menggunakan senjata. Anak-anak tersebut bahkan tidak merasa takut sekalipun terhadap bahayanya senjata yang mungkin bisa mengancam nyawa mereka.⁹⁹ Faktor kepemilikan senjata oleh setiap keluarga di Republik Afrika Tengah juga turut meningkatkan potensi konflik berdarah terjadi diantara masyarakat.

Pemerintah di Republik Afrika Tengah dianggap gagal dalam memberikan perlindungan kepada rakyatnya karena setiap hari konflik bersenjata berpotensi terjadi. Konflik yang terjadi di Republik Afrika Tengah dalam ini menuntut para warga negaranya untuk menyelamatkan

⁹⁸ OHCHR Reports, "RAPPORT SUR LES VIOLENCES SEXUELLES LIEES AUX CONFLITS COMMISES PAR LE FPRC ET L'UPC DANS LES PREFECTURES DU MBOMOU ET DE LA HAUTE-KOTTO Décembre 2020 – Mars 2022," diakses pada 03 Juni 2023, <https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2022/07/report/autodraft/rapport-violences-sexuelles-conflits-Bakouma.pdf>

⁹⁹ Raden Anggie, Wawancara oleh Penulis dengan Salah Satu Pasukan FPU 1 MINUSCA, 06 Juni 2023.

diri; salah satunya dengan cara mengungsi ke negara lain. Berdasarkan data dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) pada tahun 2022, diperkirakan sejumlah 762.700 warga Republik Afrika Tengah mengungsi ke negara lain dengan persentase 53% diantara mereka adalah perempuan dan 47% laki-laki. Sedangkan 515.700 warga lainnya harus tinggal di pengungsian dalam negara mereka sendiri akibat konflik yang mengancam keamanan mereka.¹⁰⁰

Kondisi masyarakat di Republik Afrika Tengah hingga kini juga masih memprihatinkan karena badai krisis kemanusiaan yang tidak kunjung usai. Pada tahun 2023, dilaporkan sebanyak 3,4 juta masyarakat atau 56% dari populasi penduduk di sana membutuhkan bantuan kemanusiaan. Angka ini meningkat 10% jika dibandingkan dengan data pada tahun 2022 lalu.¹⁰¹ Setiap tahunnya, jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan kemanusiaan terlihat terus meningkat meski sempat terlihat mengalami penurunan di suatu waktu. Selain itu, sebagian masyarakat Republik Afrika Tengah juga memerlukan bantuan kemanusiaan yang mendesak. Mendesak yang dimaksud dalam hal ini adalah mereka yang harus segera diberikan bantuan kemanusiaan karena kondisi fisik hingga mental mereka yang melemah karena merasa terancam atau terganggu akibat dari konflik yang tak kunjung usai.¹⁰²

Berikut ini adalah tabel yang berisikan data jumlah masyarakat Republik

¹⁰⁰ UNHCR, "Central African Republic Situation," diakses pada 31 Mei 2023, <https://reporting.unhcr.org/operational/situations/central-african-republic-situation>

¹⁰¹ UNOCHA, "Central African Republic: humanitarian needs remain severe in 2023," diakses pada 07 Juni 2023, <https://reports.unocha.org/en/country/car/card/19ACI657GI/>

¹⁰² Ibid.

Afrika yang memerlukan bantuan kemanusiaan mulai dari tahun 2018-2023.

Tabel 4.1
Data peningkatan jumlah masyarakat Republik Afrika Tengah yang memerlukan bantuan kemanusiaan

Tahun	Masyarakat yang memerlukan bantuan kemanusiaan	Masyarakat yang memerlukan bantuan kemanusiaan mendesak
2018	2,5 juta orang	1,7 juta orang
2019	2,9 juta orang	1,5 juta orang
2020	1,7 juta orang	2,6 juta orang
2021	2,8 juta orang	1,9 juta orang
2022	3,1 juta orang	2,2 juta orang
2023	3,4 juta orang	2 juta orang

Sumber: The Humanitarian Needs Overview 2023 for Central African Republic (ditabulasi oleh peneliti)¹⁰³

Krisis kemanusiaan di Republik Afrika Tengah juga diperparah dengan adanya masyarakat yang cenderung berada dalam kondisi buruk diberbagai sektor kehidupan. Untuk kasus bantuan kemanusiaan yang diperlukan oleh masyarakat yang tinggal di negara ini dibagi kedalam beberapa sektor kebutuhan mulai dari perlindungan keamanan, kekerasan berbasis gender, perlindungan terhadap anak-anak, pengungsian, pendidikan, air bersih, sanitasi, kebersihan, nutrisi, kesehatan, dan ketahanan pangan.¹⁰⁴

Konflik yang tak kunjung terselesaikan di Republik Afrika Tengah juga menyebabkan negara ini mengalami ketidakstabilan dalam bidang

¹⁰³ ReliefWeb by UNOCHA, "Central African Republic Humanitarian Needs Overview 2023 – English Summary (January 2023)" <https://reliefweb.int/report/central-african-republic/central-african-republic-humanitarian-needs-overview-2023-english-summary-january-2023>

¹⁰⁴ Ibid.

perekonomian. Meski memiliki sumber daya alam yang melimpah terutama pada bidang pertambangan seperti minyak, emas dan intan, namun Republik Afrika Tengah masih belum dapat memanfaatkannya dengan maksimal karena faktor konflik yang menyebabkan ketidakstabilan negara ini.¹⁰⁵ Negara ini bahkan dinobatkan sebagai salah satu negara termiskin di dunia. Menurut data pada tahun 2020, diperkirakan sebanyak 71% masyarakat di Republik Afrika Tengah hidup dibawah garis standar kemiskinan internasional.¹⁰⁶ Dengan melihat kondisi perekonomian negara saat ini, dalam rentang tahun 2023-2025 diperkirakan akan ada 3,5 juta masyarakat yang akan terus hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem.¹⁰⁷

Menanggapi berbagai krisis yang dialami oleh Republik Afrika Tengah, berbagai aktor internasional mulai dari PBB dan organisasi bagiannya seperti UNICEF dan UNHCR turut turun tangan dalam memberikan bantuan untuk masyarakat disana. Selain itu, organisasi internasional lain seperti IMF juga ikut meluncurkan strategi bantuan untuk meningkatkan perekonomian mereka. Organisasi regional Afrika, Uni Afrika, juga terus mengupayakan dalam memberikan bantuan-bantuan termasuk proses mediasi bagi Republik Afrika Tengah untuk dapat meraih perdamaian di negaranya.

Konflik yang terjadi di Republik Afrika Tengah telah memberikan dampak negatif yang luar biasa bagi negara ini. Tak dapat dipungkiri

¹⁰⁵ La Banque Mondiale, "République Centrafricaine - Vue d'ensemble," diakses pada 07 Juni 2023, <https://www.banquemondiale.org/fr/country/centralafricanrepublic/overview#1>

¹⁰⁶ World Bank, "the World Bank in Central African Republic," diakses pada 25 Mei 2023, <https://www.worldbank.org/en/country/centralafricanrepublic/overview>

¹⁰⁷ Ibid.

bahwa konflik bersenjata menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Republik Afrika Tengah mengalami krisis yang berkepanjangan dalam berbagai aspek kehidupan dan bernegara. Meski telah dilakukan berbagai upaya perdamaian dari para pemangku kebijakan nasional, regional bahkan internasional, ternyata masih belum dapat membantu negara ini dalam meraih kedamaian.

B. Misi Perdamaian PBB Dalam Menangani Konflik Di Republik Afrika Tengah

Republik Afrika Tengah menjadi salah satu negara di dunia dengan kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Berbagai konflik pemberontakan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terus-menerus terjadi disana. Hal ini tentunya mengancam keamanan negara dan berpotensi mempengaruhi negara sekitarnya. Sebagai salah satu organisasi yang bertanggung jawab dalam perdamaian dunia, PBB juga turut memberikan perannya dalam membentuk kedamaian di Republik Afrika Tengah.

Maraknya konflik yang terjadi di Republik Afrika Tengah menuntut PBB untuk melakukan berbagai upaya untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan keamanan disana. PBB pertama kali membentuk PKO untuk Republik Afrika Tengah melalui resolusi 1159 pada 27 Maret 1998 dan mulai aktif menjalankan mandatnya pada 15 April.¹⁰⁸ Pada saat itu, PBB membentuk *United Nations Mission In The Central African Republic* (MINURCA) sebagai upaya untuk mengatasi

¹⁰⁸ United Nations Peacekeeping, "MINURCA Background," diakses pada 08 Juni 2023, <https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/past/minurcaB.htm>

krisis setelah terjadi 3 kali serangan pemberontakan terhadap Presiden Republik Afrika Tengah, Ange-Félix Patassé, pada tahun 1996.¹⁰⁹ MINURCA ditugaskan untuk membantu dalam menjaga dan meningkatkan stabilitas di ibu kota Republik Afrika Tengah, Bangui, dan sekitarnya. MINURCA berkontribusi untuk memberikan saran dan dukungan teknis untuk pemilihan umum terlebih pemilihan presiden di sana. *Peacekeepers* yang terlibat dalam MINURCA juga ikut turut mengawasi segala hal yang berhubungan dengan pelucutan senjata, dan peningkatan kapasitas kemampuan polisi dan pemusnahan senjata sitaan di sana.¹¹⁰ Karena kondisi yang sudah dinilai tidak berbahaya, MINURCA dan pasukannya akhirnya ditarik dari misi pada tahun 2000 dan digantikan posisinya oleh *United Nations Peacebuilding Office in the Central African Republic* (BONUCA).

PBB mendirikan BONUCA yang berbentuk sebagai kantor perdamaian di Republik Afrika Tengah pada 15 Februari 2000. Saat itu BONUCA diberikan mandat untuk membantu dan mendukung upaya pemerintah Republik Afrika Tengah untuk mengkonsolidasi perdamaian dan rekonsiliasi negara. Mereka juga memperkuat institusi demokrasi dan memfasilitasi dukungan politik dan bantuan internasional untuk pemulihan perekonomian di negara ini. Untuk menjalankan BONUCA, PBB

¹⁰⁹ Romain Esmenjaud, *United Nations Mission in the Central African Republic (MINURCA)*, in Joachim A. Koops and others (eds), *The Oxford Handbook of United Nations Peacekeeping Operations*, (Oxford: Oxford University Press, 2014): 588, <https://academic.oup.com/edited-volume/28122/chapter/212301480>

¹¹⁰ United Nations Peacekeeping, "Central African Republic MINURCA," diakses pada 08 Juni 2023, <https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/past/car.htm>

mengutus beberapa penasihat dalam bidang militer dan sipil untuk melakukan perubahan terkait bidang keamanan dan program pelatihan bagi polisi.¹¹¹ BONUCA resmi berhenti menjalankan mandatnya pada tahun 2009 dan digantikan posisinya oleh *United Nations Integrated Peacebuilding Office In The Central African Republic* (BINUCA).

Pembentukan BINUCA didasari oleh keputusan presiden Dewan Keamanan PBB pada 7 April 2009. Dalam keputusan tersebut, BINUCA akan menggantikan kedudukan dari BONUCA dengan tugas-tugas yang telah ditentukan.¹¹² BINUCA merupakan salah satu upaya *peacebuilding* yang diluncurkan oleh PBB untuk Republik Afrika Tengah. Secara khusus, BINUCA diberikan mandat oleh Dewan Keamanan PBB untuk memastikan pemberian berbagai dukungan terhadap pemerintahan Republik Afrika Tengah dalam masa proses transisi mereka, memberikan bantuan terhadap pencegahan konflik dan bantuan kemanusiaan. Mereka juga berperan dalam memberikan bantuan untuk meningkatkan stabilitas keamanan negara, peningkatan kemampuan otoritas negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, serta mempromosikan kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.¹¹³

BINUCA aktif menjalankan tugasnya hingga kemudian pada tahun 2013 konflik kudeta dari kelompok Seleka terhadap Presiden meletus di

¹¹¹ United Nations Security Council, "Chapter V Subsidiary organs of the Security Council," diakses pada 08 Juni 2023, https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/en/sc/repertoire/2000-2003/00-03_5.pdf#page=33

¹¹² Statement by the President of the Security Council (S/PRST/2009/5)

¹¹³ BINUCA, "BINUCA Mandate," diakses pada 09 Juni 2023, <https://binuca.unmissions.org/en/mandate>

Republik Afrika Tengah. Hal ini lalu membuat BINUCA kesulitan menjalankan tugas-tugas mereka. Konflik yang terjadi juga semakin parah dan membahayakan keamanan masyarakat di sana. Pada akhirnya, BINUCA memprioritaskan keamanan dan keselamatan staf dengan mengevakuasi mereka. Dan karena ini, BINUCA kemudian memutuskan untuk tidak menjalankan tugas apapun untuk sementara waktu.¹¹⁴ Kondisi yang semakin tidak terkendali di Republik Afrika Tengah akhirnya menuntut PBB untuk melakukan upaya lain yang lebih besar.

Konflik akibat kudeta yang dilakukan oleh Seleka terhadap Francois Bozize dinilai sudah terlalu parah. Hal ini ditambah dengan munculnya kelompok pemberontak Anti-Balaka sebagai bentuk perlawanan kepada Seleka. Karena keadaan yang dinilai sudah cukup berbahaya, Uni Afrika yang didukung oleh PBB lalu membentuk sebuah misi perdamaian *The African-led International Support Mission to the Central African Republic* (MISCA). Melalui resolusi 2127 Dewan Keamanan yang dirilis pada 5 Desember 2013, PBB resmi menyetujui pembentukan MISCA dengan beberapa mandat yang diberikan mulai dari: (a) perlindungan warga dan pemulihan keamanan publik dengan langkah-langkah yang tepat; (b) stabilisasi dan pemulihan otoritas negara; (c) memberikan dan menyediakan bantuan kemanusiaan; (d) berkoordinasi dengan BINUCA untuk membantu proses DDR (*disarmament, demobilization and reintegration*) dan DDRRR (*disarmament,*

¹¹⁴ Herni Widianti, "Peran BINUCA (Bureau Intégré de l'Organisation des Nations Unies en Centrafrique) dalam Menjaga Perdamaian di Republik Afrika Tengah Tahun 2010-2014," *Jom FISIP* Vol. 2 No. 2 (2015): 13, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/7508/0>

demobilization, repatriation, reintegration and resettlement); (e) membantu upaya pemerintahan negara atau internasional untuk melakukan reformasi dan restrukturisasi sektor pertahanan dan keamanan yang dipimpin oleh otoritas transisi dan dikoordinasikan oleh BINUCA.¹¹⁵

MISCA pertama kali diterjunkan langsung kelapangan pada 19 Desember 2013. Pasukan yang tergabung didalamnya berasal dari berbagai negara di Afrika. Selain itu, Prancis juga turut menyumbangkan 2000 pasukan mereka.¹¹⁶ Namun pada kenyataannya, MISCA ternyata tidak dapat memberikan dampak signifikan terhadap upaya perdamaian di Republik Afrika Tengah. MISCA sendiri sejak awal dibentuk sebagai misi sementara atau respon cepat untuk konflik yang terjadi di Republik Afrika Tengah sebelum PBB membentuk misi perdamaian dengan skala pasukan yang lebih besar.¹¹⁷ Setelah hampir 9 bulan bertugas, pada 15 September 2014 MISCA akhirnya digantikan tugasnya oleh misi perdamaian baru PBB untuk Republik Afrika Tengah atau *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission In The Central African Republic* (MINUSCA).

MINUSCA dibentuk melalui resolusi 2149 Dewan Keamanan PBB yang dirilis pada 10 April 2014. Resolusi tersebut menyatakan jika tugas hingga wewenang dari BINUCA dan MISCA akan sepenuhnya dialihkan

¹¹⁵ United Nations Security Council Resolution 2127 (S/RES/2127 (2013))

¹¹⁶ MISCA, "MISCA Establishment," diakses pada 09 Juni 2023, <http://misca.peaceau.org/en/page/110-about-misca>

¹¹⁷ Muhammad Khizbul Maula, "Peran United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission In The Central African Republic (MINUSCA) Dalam Proses Gencatan Senjata Di Republik Afrika Tengah (RAT) Pada 2014-2015", *skripsi*, (2019): 6, <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/171414/1/Muhammad%20Khizbul%20Maula.pdf>

kepada MINUSCA. Hal ini sekaligus mengakhiri periode tugas dari 2 misi PBB dan Uni Afrika ini, serta menjadi awal untuk PBB sebagai tokoh utama dalam membantu pembentukan perdamaian di Republik Afrika Tengah. PBB melalui MINUSCA mengirimkan kurang lebih 10.000 personel militer termasuk 240 pengamat militer dan 200 staf di dalamnya. 1.800 personel polisi termasuk 1.400 polisi dalam satuan unit pasukan (FPU) dan 400 lainnya merupakan polisi perorangan (IPO).¹¹⁸ Berbagai personel militer dan polisi yang diberangkatkan oleh PBB ke Republik Afrika Tengah ini berasal dari berbagai negara dan telah melewati proses seleksi ketat. Ini juga menjadi salah satu misi perdamaian di Republik Afrika Tengah dengan jumlah pasukan terbesar yang pernah terlibat.

Selama masa tugasnya, MINUSCA diberikan mandat utama untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, mendukung segala proses perdamaian termasuk gencatan senjata dan perjanjian perdamaian, membantu dalam pemberian bantuan kemanusiaan, membantu perluasan otoritas negara, membantu mengawasi jalannya pemilu, memberikan dukungan untuk proses rekonsiliasi dan DDR (*disarmament, demobilization and reintegration*). Selain itu, MINUSCA juga menyoroti isu gender dan ditugaskan untuk membantu meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang yang berhubungan dengan pembentukan perdamaian.¹¹⁹ Hingga kini MINUSCA telah menjalankan

¹¹⁸ United Nations Security Council Resolution 2149 (S/RES/2149 (2014))

¹¹⁹ World Peace Foundation, "United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA) / African-led International Support Mission in the

tugas dan mandatnya selama lebih dari 8 tahun. Pelaksanaan mandat dari MINUSCA juga telah diperbaharui sehingga masih akan aktif hingga 15 November 2023.

PBB telah menunjukkan berbagai upayanya untuk membentuk dan mendorong agar perdamaian terbentuk di Republik Afrika Tengah. Sampai saat inipun PBB juga masih terus memperjuangkan perdamaian di negara ini. Berbagai negara yang turut mengirimkan pasukan militer atau polisi mereka sebagai *peacekeepers* secara tidak langsung juga menunjukkan dukungan mereka untuk Republik Afrika Tengah. Para *peacekeepers* yang rela mempertaruhkan nyawanya juga menjadi bukti perjuangan masyarakat internasional untuk mewujudkan perdamaian di dunia.

C. Pasukan Garuda Perempuan di Republik Afrika Tengah

Indonesia pertama kali mengirimkan Pasukan Garuda untuk misi MINUSCA pada tahun 2014 yang beranggotakan pasukan TNI dengan nama Pasukan Garuda Satuan Tugas Kompi Zeni (Kizi) TNI. Pada saat itu bahkan hingga hari ini keterlibatan perempuan dari TNI masih belum ada. Indonesia baru melibatkan perempuan dalam Pasukan Garuda MINUSCA pada tahun 2019 melalui satuan tugas Pasukan Garuda Bhayangkara atau FPU MINUSCA. Meski biasanya didominasi oleh pasukan TNI, namun untuk misi MINUSCA, Pasukan Garuda perempuan didominasi oleh polisi wanita atau polwan.

Central African Republic (MINUSCA) Short Mission Report,” diakses pada 10 Juni 2023, <https://sites.tufts.edu/wpf/files/2017/07/Central-African-Republic-brief.pdf>

Anggota polisi wanita yang tergabung dalam Pasukan Garuda biasanya disebut sebagai *Formed Police Unit* (FPU). FPU merupakan satuan unit polisi yang terlatih dan memiliki kemampuan penggunaan senjata yang mumpuni, kohesif, dan memberikan dukungan keamanan untuk misi perdamaian PBB.¹²⁰ Untuk Indonesia, segala yang berhubungan berhubungan dengan pasukan FPU mereka akan berada dibawah kewenangan dari Divisi Hubungan Internasional Polri.

Untuk misi MINUSCA, keterlibatan Pasukan Garuda perempuan pertama kali diwakili oleh dua orang polisi wanita yang tergabung sebagai *Individual Police Officer* (IPO) pada awal tahun 2019.¹²¹ Lalu pada tahun yang sama, Indonesia lalu memberangkatkan Pasukan Garuda Bhayangkara mereka dalam satuan FPU yang melibatkan sebanyak 140 personel dengan 14 polisi perempuan tergabung didalamnya. Selain IPO dan FPU, terdapat Pasukan Garuda perorangan yang bertugas sebagai staf atau mereka yang memiliki keahlian khusus terkait militer yang juga turut bergabung dalam misi MINUSCA. Sedangkan untuk personel Pasukan Garuda perempuan yang berasal dari TNI hingga kini masih belum ada yang terlibat dalam MINUSCA.

Meski pada awalnya hanya melibatkan kurang lebih 10% personel perempuan dalam keseluruhan jumlah pasukan pertamanya, Pemerintah

¹²⁰ United Nations Department of Peacekeeping Operations, "Formed Police Unit in United Nations Peacekeeping Operations," diakses pada 15 Juni 2023, https://police.un.org/sites/default/files/fpu_policy_2016.pdf

¹²¹ United Nations Peacekeeping, "Summary of Contribution to UN Peacekeeping by Country, Mission and Post (February 2019)," diakses pada 15 Juni 2023, https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/5_mission_and_country_13.pdf

Indonesia terus menunjukkan komitmen mereka untuk meningkatkan jumlah keterlibatan perempuan dalam Pasukan Garuda MINUSCA. Menurut pernyataan dari Kasiminpers FPU 1 MINUSCA, Acp Leonisya Sagita, keterlibatan polisi wanita Indonesia dalam misi perdamaian MINUSCA telah dianggap memenuhi ketentuan dari PBB untuk meningkatkan keberadaan perempuan yang sangat kurang dalam misi perdamaian.¹²² Keterlibatan perempuan dalam Pasukan Garuda juga telah sesuai dengan *Uniformed Gender Parity Strategy 2018-2028* dari DPKO yang menuntut negara penyumbang *peacekeepers* untuk melibatkan setidaknya satu unit pasukan atau peleton yang terdiri dari personel perempuan dalam keseluruhan jumlah pasukannya.¹²³

Menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan jumlah keterlibatan pasukan perempuan sesuai dengan ketentuan dari PBB, Indonesia telah menunjukkan peningkatan jumlah personel perempuan untuk misi MINUSCA setiap tahunnya sejak awal keterlibatan mereka dalam misi MINUSCA pada tahun 2019. Berikut ini adalah tabel jumlah keterlibatan pasukan perempuan Indonesia dalam misi perdamaian MINUSCA (data yang digunakan per Desember setiap tahunnya).

Tabel 4.2
Jumlah Keterlibatan Pasukan Garuda perempuan dalam MINUSCA

Tahun	Kontingen Militer	FPU (Formed Police Unit)	IPO (Individual Police Officer)	Staff	Expert on Mission	Total

¹²² YouTube 86 & Custom Protection NET, “Pelatihan Pre Deployment Visit & UN FPAT FPU 1 Minusca,” diakses pada 15 Juni 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=BxQ6tSudG7E>

¹²³ Department of Peace Operations, *Uniformed Gender Parity Strategy 2018-2028*.

2019	-	14	2	1	1	18
2020	-	16	-	2	2	20
2021	-	18	2	2	2	24
2022	-	25	5	1	1	32

Sumber : United Nations Peacekeeping Troops and Police Contributors 2019-2020
(ditabulasi oleh peneliti)¹²⁴

Sejauh ini, Indonesia telah mengirimkan 4 satuan tugas mereka ke Republik Afrika Tengah yaitu Satuan Garbha FPU 1,2,3, dan 4 MINUSCA. Sedangkan untuk FPU 5 MINUSCA saat ini sedang dalam tahap pelatihan sebelum akhirnya diberangkatkan ke Republik Afrika Tengah pada akhir tahun mendatang. FPU 1 MINUSCA ditugaskan selama 1 tahun mulai tahun 2019-2020. Tugasnya kemudian dilanjutkan oleh FPU 2 MINUSCA pada 2020-2021. FPU 3 MINUSCA lalu menjalankan tugasnya pada 2021-2022. Sementara itu pasukan FPU 4 MINUSCA saat ini masih berada di Republik Afrika Tengah untuk menuntaskan tugas mereka menjalankan mandat PBB untuk misi perdamaian di sana.

Untuk dapat bergabung sebagai Pasukan Garuda dalam misi MINUSCA, para personel perempuan yang telah mendaftar sebelumnya harus melewati berbagai proses seleksi ketat dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mereka juga bersaing dengan seluruh kandidat pendaftar dari berbagai wilayah di Indonesia. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2019, disebutkan dalam pasal 5 jika

¹²⁴ United Nations Peacekeeping, "Troops and Police Contributors," diakses pada 18 Juni 2023, <https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors>

mereka yang tergabung dalam FPU MINUSCA nantinya akan bertugas selama satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan permintaan PBB.¹²⁵ Mereka akan berada bawah kewenangan PBB dan akan aktif berpartisipasi dalam menjalankan mandat PBB untuk MINUSCA. Keterlibatan pasukan perempuan dalam MINUSCA menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh Polri. Terlebih karena misi ini menjadi salah satu misi perdamaian yang cukup berbahaya mengingat potensi konflik tak hanya mengancam nyawa masyarakat tapi juga mereka yang menjadi *peacekeepers*.

Untuk menjadi bagian dari Pasukan Garuda MINUSCA, para calon *peacekeepers* dari berbagai wilayah terlebih dahulu diberikan pengumuman perekrutan yang dilakukan oleh Polri. Menurut penuturan dari Ibu Raden Anggie yang merupakan salah satu anggota FPU 1 MINUSCA, pengumuman pendaftaran untuk menjadi pasukan FPU biasanya disebarakan oleh Mabes Polri melalui grup-grup dari berbagai satuan kerja dan wilayah sehingga bagi mereka yang berminat dapat segera mendaftar.¹²⁶ Para calon *peacekeepers* baik laki-laki maupun perempuan kemudian harus melalui penyeleksian melalui berbagai tes mulai dari tes tertulis, tes psikologi, tes bahasa Inggris, tes menembak, tes

¹²⁵ Keputusan Presiden (KEPPRES) No 7 Tahun 2019 tentang Pengalihan Penugasan Kontingen Garuda Bhayangkara Satuan Tugas Formed Police Unit Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Sudan Selatan Menjadi Kontingen Garuda Bhayangkara Satuan Tugas Formed Police Unit Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Afrika Tengah.

¹²⁶ Raden Anggie, Wawancara oleh Penulis dengan Salah Satu Pasukan FPU 1 MINUSCA, 06 Juni 2023.

mengendarai mobil, dimana seluruh tesnya dilakukan dengan standar internasional yang lebih ketat. Selain kemampuan diri dan bahasa yang mumpuni, para calon *peacekeepers* juga dituntut untuk memiliki kemampuan menguasai kebudayaan atau kesenian Indonesia. Hal ini karena saat menjadi *peacekeepers* mereka tak hanya menjalankan mandat PBB tetapi juga sekaligus mempromosikan budaya Indonesia di kancan internasional.¹²⁷

Setelah dinyatakan lulus seleksi tes, para calon *peacekeepers* ini juga masih harus melalui tahapan selanjutnya yaitu tahapan pelatihan atau latpraops (latihan pra operasi). Selama masa latpraops, para calon *peacekeepers* tanpa membedakan antara laki-laki dengan perempuan dilatih agar dapat memiliki kemampuan untuk bertahan yang setara di wilayah konflik. Berbagai kegiatan pelatihan mulai dari pelatihan fisik, penggunaan senjata, kemampuan bela diri, hingga pengetahuan terkait misi perdamaian wajib diikuti oleh mereka. Para calon *peacekeepers* perempuan juga diberikan pelatihan *close quarters combat* atau pertarungan jarak dekat. Mereka juga diharuskan mahir dalam menggunakan senjata dan tanggap dalam bertindak saat menghadapi segala kemungkinan serangan.¹²⁸ Selain pelatihan fisik, para calon *peacekeepers* ini juga diberikan pembelajaran bahasa Perancis dan bahasa lokal Republik Afrika Tengah untuk mempermudah saat berinteraksi

¹²⁷ Ibid.

¹²⁸ YouTube Peacekeepers Polri, "POLWAN PEACEKEEPER POLRI SEBELUM DIBERANGKATKAN KE DAERAH MISI - FPU 1 MINUSCA," diakses pada 15 Juni 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=5fRXiFQet6M&t=29s>

dengan masyarakat di sana. Proses pelatihan ini dilakukan selama 3 bulan atau lebih dan berlokasi di Puslat Multifungsi Polri di Cikeas, Bogor.¹²⁹

Setelah melalui serangkaian proses pelatihan, para calon *peacekeepers* untuk MINUSCA ini juga masih harus menghadapi proses penilaian dari pihak perwakilan dari DPKO dan MINUSCA melalui kegiatan *pre deployment visit*. Kegiatan ini dilakukan oleh PBB untuk memeriksa kesiapan diri dan perlengkapan dari *peacekeepers* Indonesia untuk misi MINUSCA. Melalui kegiatan ini, para *peacekeepers* juga melakukan demonstrasi seolah-olah berada di Republik Afrika Tengah dan menghadapi para kelompok pemberontak yang melakukan penyerangan untuk meyakinkan para pihak bahwa mereka memang pantas untuk menjadi *peacekeepers*.¹³⁰

Setelah dinyatakan layak untuk menjadi *peacekeepers*, para personel polisi yang tergabung dalam bagian dari Pasukan Garuda Bhayangkara akan diresmikan posisinya melalui upacara pembaretan. Mereka kemudian akan diberangkatkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sebelum seluruh Pasukan Garuda dilepaskan secara resmi untuk berangkat ke Republik Afrika Tengah melalui upacara pelepasan, beberapa personel yang tergabung dalam pasukan *advance* telah lebih dulu berangkat dalam kurun waktu sebulan hingga dua minggu sebelumnya untuk memeriksa segala kelengkapan dan kondisi di Republik Afrika

¹²⁹ Raden Anggie, Wawancara oleh Penulis dengan Salah Satu Pasukan FPU 1 MINUSCA, 06 Juni 2023.

¹³⁰ YouTube 86 & Custom Protection NET, "Pelatihan Pre Deployment Visit & UN FPAT FPU 1 Minusca," diakses pada 15 Juni 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=BxQ6tSudG7E>

Tengah.¹³¹ Setelah itu barulah seluruh Pasukan Garuda resmi berangkat dan menjalankan tugas mereka untuk misi perdamaian MINUSCA.

Para perempuan yang tergabung dalam Pasukan Garbha FPU MINUSCA menghadapi berbagai rintangan dan tantangan mulai dari suhu yang mencapai 40 derajat celcius, sarana dan prasarana seperti listrik dan air yang tidak memadai, tempat istirahat yang sederhana, hingga terjangkit penyakit malaria, menjadi suatu kekhawatiran tersendiri yang harus dihadapi oleh para Pasukan Garuda Perempuan. Namun seiring berjalannya waktu, sarana dan prasarana yang diperlukan oleh Pasukan FPU MINUSCA mulai diperbaiki.

Pasukan Garuda perempuan yang bertugas di Republik Afrika Tengah tinggal di kamp dengan luas tanah sebesar 2,7 hektar dan dibangun bersama oleh personel laki-laki maupun perempuan. Kamp yang diberi nama Garuda Camp ini berlokasi di Mpoko, Bangui, Republik Afrika Barat. Kamp ini mencakup beberapa fasilitas mulai dari kamar istirahat, dapur dan ruang makan, klinik kesehatan, ruang ibadah (masjid, gereja, pura, vihara), kantor, ruang *laundry*, ruangan fungsional. Selain itu juga ada fasilitas penunjang lainnya mulai dari *tower guard*, *safety zone*, *check point* dan *control room*, ruang pengolahan air bersih, genset listrik, penyedia informasi dan teknologi, lapangan olahraga dan ruang hiburan (*welfare*).¹³²

¹³¹ Raden Anggie, Wawancara oleh Penulis dengan Salah Satu Pasukan FPU 1 MINUSCA, 06 Juni 2023.

¹³² YouTube Peacekeepers Polri, "GARUDA CAMP DI BANGUI CENTRAL AFRIKA - FPU 1 MINUSCA," diakses pada 17 Juni 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=W5DScxIyt8w>

Para personel perempuan ini juga harus mempertaruhkan nyawa mereka karena kondisi wilayah yang tidak stabil. Hampir setiap hari para personel Pasukan Garuda mendengar suara tembakan terutama saat malam hari. Bahkan menurut pengalaman dari Ibu Raden Anggie sering sekali terjadi kejadian-kejadian tidak terduga seperti kebakaran atau masjid yang roboh akibat konflik yang terjadi.¹³³ Meskipun begitu para perempuan anggota Pasukan Garuda Bhayangkara FPU MINUSCA ini tetap menunjukkan profesionalisme mereka selama menjalankan tugas mereka untuk menjaga stabilitas di wilayah konflik Republik Afrika Tengah.

Pasukan Garuda yang telah menuntaskan tugasnya di Republik Afrika Tengah akan disambut saat tiba di tanah air. Polri juga akan melaksanakan upacara purna tugas untuk mengapresiasi perjuangan Pasukan Garuda saat bertahan di wilayah konflik. Meski berat, Ibu Raden Anggie menyatakan jika beliau bersama dengan anggota perempuan yang lain masih termotivasi untuk dapat berangkat kembali bertugas dalam misi perdamaian PBB.

D. Peran Pasukan Garuda Perempuan Dalam MINUSCA

Keterlibatan perempuan dalam Pasukan Garuda MINUSCA telah menjadi salah satu bukti komitmen Indonesia untuk mendorong kemajuan perempuan dalam misi perdamaian. Melalui Pasukan Garuda MINUSCA dari tahun 2019-2022, Indonesia telah melibatkan hampir 100 orang anggota polisi perempuan mereka yang tergabung dalam satuan tugas

¹³³ Raden Anggie, Wawancara oleh Penulis dengan Salah Satu Pasukan FPU 1 MINUSCA, 06 Juni 2023.

Pasukan Garuda Bhayangkara FPU MINUSCA. Para perempuan ini dilibatkan secara langsung untuk turun dalam wilayah konflik dimana misi perdamaian dilaksanakan.

Secara umum tugas yang dijalankan oleh personel perempuan tidak ada yang berbeda dengan personel laki-laki. Meski dibentuk oleh pemerintah Indonesia, tetapi Pasukan Garuda akan bertugas sesuai dengan mandat yang diberikan Dewan Keamanan PBB dalam misi MINUSCA. Mantan Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri, Irjen. Pol. Krishna Murti, menyatakan jika Pasukan Garuda FPU MINUSCA menjalankan tugas mulai dari memberikan perlindungan kepada warga sipil dan petugas PBB yang bertugas dalam misi MINUSCA. Selain itu, Pasukan Garuda FPU MINUSCA juga memberikan bantuan atau mendorong pemerintah Republik Afrika Tengah untuk dapat menegakan hukum dan otoritas dari pemerintahan setempat yang hancur setelah dilanda konflik yang berkepanjangan.¹³⁴ Sementara itu, berdasarkan penuturan dari personel perempuan Pasukan Garuda FPU 1 MINUSCA, mereka memiliki 3 tugas pokok utama yaitu perlindungan kepada masyarakat sipil, perlindungan kepada pasukan dan aset yang dimiliki PBB di Republik Afrika Tengah, serta yang terakhir yaitu memperkenalkan budaya Indonesia di kancah internasional.¹³⁵

¹³⁴ YouTube 86 & Custom Protection NET, "Momen Haru Pelepasan Tim Satgas Garuda FPU 1 Minusca ke Daerah Misi," diakses pada 17 Juni 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=DLDML8TDFUs>

¹³⁵ YouTube R.A TNZ, "PEACEKEEPER POLRI itu Apa sih?," diakses pada 17 Juni 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=nHAeg5uDjqI>

Selama bertugas di Republik Afrika Tengah, anggota Pasukan Garuda dibagi kedalam beberapa tim. Tim tersebut mencakup tim taktis yang bertugas untuk melakukan pengamanan, tim *security camp* yang bertugas untuk menjaga kamp tempat Pasukan Garuda tinggal, tim manase yang bertugas mengurus segala hal terkait pengolahan makanan, tim swat yang bertugas menangani jika ada masalah-masalah yang berbahaya dan mendesak, serta ada tim staf yang bertugas sesuai dengan keahlian mereka masing-masing seperti contohnya staf kesehatan dan humas.

Dalam misi MINUSCA, personel perempuan Pasukan Garuda melaksanakan tugas dan kewajiban mereka sebagai *peacekeepers*. Berdasarkan konsep peran, seorang individu dikatakan dapat memiliki peranan apabila mereka telah menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimiliki. Oleh karena itu, Pasukan Garuda perempuan dalam misi MINUSCA telah memberikan perannya yang meliputi beberapa hal berikut:

1) Melaksanakan patroli

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama dengan salah satu polisi wanita yang tergabung dalam Pasukan Garuda Bhayangkara FPU 1 MINUSCA, Ibu Raden Anggie, beliau menuturkan jika tugas utama saat berada di Republik Afrika Tengah adalah melakukan patroli. Patroli ini dilakukan setiap hari oleh setiap regu yang telah ditentukan sebelumnya. Setiap pleton akan dibagi menjadi 3 regu dan dibagi kedalam beberapa *shift*

yang bertugas pada pagi, siang dan malam hari. Selain itu, mereka juga memiliki jadwal untuk patroli bersama dengan *peacekeepers* dari negara lainnya.¹³⁶

Para personel perempuan Pasukan Garuda dalam misi MINUSCA kerap kali membagikan foto maupun video dari kegiatan mereka melalui akun instagram masing masing. Salah satunya yaitu Ibu Fitria Budi Prastiwi (@fitriaprastiwiii) yang merupakan anggota Pasukan Garbha FPU 4 MINUSCA yang kerap membagikan kegiatan patrolinya selama bertugas di Republik Afrika Tengah.

Sebagai *peacekeepers* yang memiliki kewajiban untuk menjalankan mandat PBB untuk MINUSCA, Pasukan Garuda perempuan telah memenuhi kewajiban mereka dalam mandat yaitu perlindungan terhadap masyarakat sipil. Selain sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat sipil, kegiatan patroli yang dilakukan oleh personel perempuan juga termasuk sebagai bentuk perlindungan kepada seluruh *peacekeepers* dan aset PBB di MINUSCA seperti yang tertulis dalam mandat. Hal ini merupakan sebuah peran yang dilakukan oleh perempuan dengan status mereka sebagai *peacekeepers* dalam membantu pelaksanaan PKO.

2) Menciptakan interaksi yang baik dengan masyarakat

¹³⁶ Raden Anggie, Wawancara oleh Penulis dengan Salah Satu Pasukan FPU 1 MINUSCA, 06 Juni 2023.

Melalui kegiatan patroli yang dilakukan setiap hari, personel perempuan Pasukan Garuda juga melakukan kunjungan ke masyarakat di Republik Afrika Tengah sesuai dengan pembagian wilayah pelaksanaan patroli. Para personel perempuan menunjukkan interaksi yang baik dengan masyarakat setempat. Selama berkunjung, personel Pasukan Garuda perempuan disambut antusias oleh masyarakat Republik Afrika Tengah. Hal ini karena para personel perempuan memiliki kepribadian yang ramah sehingga dapat membuat masyarakat merasa nyaman berinteraksi dengan mereka.



Gambar 4.1 Potret kedekatan Ibu Raden Anggie dari Pasukan Garbha FPU 1 MINUSCA dengan anak-anak Republik Afrika Tengah.¹³⁷

Meskipun personel Perempuan memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat, selama kunjungan terdapat sebuah pantangan dimana mereka tidak boleh memberikan makanan kepada masyarakat.

¹³⁷ Dokumentasi pribadi dari Ibu Raden Anggie anggota Pasukan Garbha FPU 1 MINUSCA

“...mereka itu pantang kita kasih makan. Sekali kita kasih makan mereka bakal minta terus dan pasti ngajak orang. Kita kan bawa biskuit dan segala macam dan mereka kan jarang makan seperti itu, jadi kalau bisa jangan dikasih hatilah gitu”¹³⁸

Selain pantang memberikan makanan, para personel Pasukan Garuda juga tidak dapat mengambil foto masyarakat secara sembarangan. Masyarakat yang tinggal di Republik Afrika Tengah sangat sensitif terhadap kamera. Pengambilan gambar maupun video tanpa izin dapat memancing amukan dan kemarahan dari masyarakat. Sehingga personel Pasukan Garuda yang ingin mendokumentasi kegiatan mereka harus mengantongi izin terlebih dahulu dari masyarakat yang dikunjungi.

Pasukan Garuda perempuan memberikan peran aktif mereka sebagai *peacekeepers* dengan menciptakan interaksi yang baik bersama dengan masyarakat. Adanya hubungan yang harmonis dapat membantu dalam membangun kepercayaan antara masyarakat dengan Pasukan Garuda perempuan. Hal ini kemudian menjadi bukti nyata dari keyakinan Pemerintah Indonesia tentang pasukan perempuan yang memiliki kelebihan dimana mereka memiliki empati yang lebih tinggi dari pasukan laki-laki. Sehingga proses pendekatan antara personel perempuan dengan masyarakat dapat terjalin lebih mudah karena adanya ikatan emosional yang tercipta antara keduanya. Ini tentunya dapat mempermudah dalam

¹³⁸ Raden Anggie, Wawancara oleh Penulis dengan Salah Satu Pasukan FPU 1 MINUSCA, 06 Juni 2023.

memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai potensi konflik yang terjadi karena adanya kepercayaan antara mereka. Pasukan Garuda perempuan dalam hal ini juga telah memenuhi harapan PBB untuk peranan perempuan dalam misi perdamaian khususnya memberikan perlindungan kepada masyarakat sipil.

3) Pengamanan kegiatan penting pemerintah

Dalam mandat PBB untuk MINUSCA disebutkan bahwa *peacekeepers* memiliki kewajiban untuk dapat memberikan dukungan kepada pemerintah Republik Afrika Tengah terutama dalam aspek politik. Termasuk juga dukungan terhadap keberhasilan proses transisi pemerintah dan negara menuju perdamaian. Hal ini diwujudkan dengan keterlibatan personel perempuan bersama dengan personel Pasukan Garuda lain dalam tugas melakukan pengamanan saat terdapat acara-acara besar atau kegiatan penting sesuai dengan permintaan dari pemerintah Republik Afrika Tengah.

Personel perempuan Pasukan Garuda FPU 1 MINUSCA saat bertugas tahun 2019-2020 lalu sempat diberikan tugas untuk melakukan pengamanan saat pelaksanaan tes pendaftaran anggota Brimob Republik Afrika Tengah.¹³⁹ Sementara itu, Pasukan Garuda FPU 2 MINUSCA juga pernah ditugaskan untuk melakukan pengamanan selama proses pemilihan umum Presiden

¹³⁹ YouTube R.A TNZ, "GIAT PENGAMANAN Pasukan Garuda BHAYANGKARA di Rep. Afrika Tengah!!!," diakses pada 17 Juni 2023, https://www.youtube.com/watch?v=Dkt_0aea6hA

Republik Afrika Tengah berlangsung pada Desember 2020 hingga Januari 2021.¹⁴⁰



*Gambar 4.2 Pasukan Garbha FPU 1 MINUSCA saat menjalankan tugas di Republik Afrika Tengah.*¹⁴¹

Prestasi membanggakan juga diukir oleh salah seorang polisi wanita anggota Pasukan Garbha FPU 3 MINUSCA, Ipda Della Indah Lestari, yang menjadi polisi wanita pertama yang memimpin upacara penganugerahan penghargaan dari PBB untuk para *peacekeepers* yang bertugas di Republik Afrika Tengah.¹⁴² Tak hanya itu, seluruh anggota dari Pasukan Garbha FPU 3 MINUSCA juga meraih penghargaan *UN Peacekeeping Medal* dari PBB. *UN Peacekeeping Medal* merupakan kehormatan tertinggi yang diberikan oleh PBB untuk para *peacekeepers* yang telah

¹⁴⁰Tribun Pontianak, “Kisah Iptu Ina, Polwan Kalbar Penjaga Perdamaian PBB di Afrika,” diakses pada 17 Juni 2023, <https://tribunpontianakwiki.tribunnews.com/2021/01/21/kisah-iptu-ina-polwan-kalbar-penjaga-perdamaian-pbb-di-afrika?page=all>

¹⁴¹ Dokumentasi pribadi dari Ibu Raden Angie anggota Pasukan Garbha FPU 1 MINUSCA

¹⁴² Kumparan, “Ipda Della, Polwan Asal Lampung Pertama Kali Pimpin Upacara Internasional di PBB,” diakses pada 18 Juni 2023, <https://kumparan.com/lampunggeh/ipda-della-polwan-asal-lampung-pertama-kali-pimpin-upacara-internasional-di-pbb-1ylws0P1Fb1/full>

mengabdikan dirinya untuk menjaga perdamaian di wilayah konflik.¹⁴³

Dengan terlibat dalam kegiatan pengamanan saat acara-acara penting yang dilaksanakan oleh pemerintah Republik Afrika Tengah, Pasukan Garuda perempuan menunjukkan peran sesuai dengan statusnya sebagai *peacekeepers*. Dengan turun langsung membantu menjaga pengamanan kegiatan, Pasukan Garuda perempuan telah menjalankan kewajiban mereka untuk mendukung proses transisi pemerintah menuju perdamaian.

4) Memberikan fasilitas bantuan kemanusiaan

Para personel perempuan Pasukan Garuda juga turut terlibat dalam berbagai kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat atau CIMIC (*civil military coordination*). Salah satunya yaitu seperti kegiatan pembagian air bersih untuk masyarakat.¹⁴⁴ Hal ini dibuktikan melalui pernyataan langsung dari Ibu Inayatun Nurhasanah dalam wawancara bersama dengan Tribun Pontianak. Selain itu, Ibu Nadya Septina Partawi (@nadya_septina_pratiwi) yang juga terlibat dalam kegiatan ini turut membagikan video saat dirinya membantu pembagian air bersih dalam unggahan Instagram pribadinya. Keduanya

¹⁴³ YouTube Divisi Humas Polri, “PBB Berikan Penghargaan Kepada Satgas Garbha FPU 3 MINUSCA,” diakses pada 18 Juni 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=TVIopCIunHc>

¹⁴⁴ Tribun Pontianak, “Kisah Iptu Ina, Polwan Kalbar Penjaga Perdamaian PBB di Afrika,” diakses pada 17 Juni 2023, <https://tribunpontianakwiki.tribunnews.com/2021/01/21/kisah-iptu-ina-polwan-kalbar-penjaga-perdamaian-pbb-di-afrika?page=all>

merupakan personel perempuan dari Pasukan Garuda FPU 2 MINUSCA.

Tak hanya aktif membantu kegiatan bantuan masyarakat, Ibu Inayatun Nurhasanah, selama bertugas di Republik Afrika Tengah juga pernah menjadi *focal point* untuk eksploitasi dan pelecehan seksual di pasukannya. Bersama dengan *liaison officer* atau petugas penghubung, Ibu Inayatun Nurhasanah memberikan pelatihan kepada seluruh personel untuk memastikan mereka memahami mekanisme cara pelaporan dan konsekuensi jika melanggar standar perilaku dari PBB terkait eksploitasi dan pelecehan seksual.¹⁴⁵

Dalam mandat PBB untuk MINUSCA, tertulis bahwa *peacekeepers* yang terlibat dalam misi ini memiliki tugas dan kewajiban untuk menyediakan fasilitas terhadap bantuan kemanusiaan. Pasukan Garuda perempuan kemudian memenuhi kewajiban tersebut salah satunya dengan turut membantu kegiatan pembagian air mengingat sulitnya masyarakat dalam mengakses air bersih di negaranya. Melalui hal ini, Pasukan Garuda perempuan kemudian menunjukkan perannya dengan menjalankan kewajiban sesuai dengan statusnya sebagai *peacekeepers*.

¹⁴⁵ UN Women Asia and Pacific, "Take Five: "The role of women in building international peace is increasing, but needs more of us to step up," diakses pada 17 Juni 2023, <https://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2021/05/take-five-inayatun-nurhasanah>

Selain peran sebagai *peacekeepers* dalam misi MINUSCA yang telah disebutkan sebelumnya, Pasukan Garuda perempuan juga ditugaskan oleh pemerintah Indonesia untuk mempromosikan budaya Indonesia di kancah internasional khususnya di kalangan para *peacekeepers* seluruh dunia. Selama berada di Republik Afrika Tengah para personel Pasukan Garuda biasanya menampilkan berbagai budaya atau kesenian dari berbagai daerah di Indonesia seperti tari saman, tari jaranan, dan tari kecak. Penampilan seni dari Pasukan Garuda berhasil menarik perhatian dan antusiasme *peacekeepers* dari seluruh dunia yang menyaksikan penampilan mereka.¹⁴⁶ Banyaknya budaya dan kesenian yang dimiliki oleh Indonesia menjadi salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Pasukan Garuda MINUSCA dibandingkan dengan pasukan dari negara lainnya.

Selama menjalankan tugas, para personel perempuan Pasukan Garuda menggunakan perlengkapan pelindung diri dan senjata lengkap beserta dengan amunisinya. Potensi konflik bersenjata yang dapat terjadi kapan saja menjadi salah satu penyebabnya. Ibu Raden Anggie sempat membagikan pengalamannya saat terjebak di antara konflik bersenjata masyarakat Republik Afrika Tengah selama beliau melaksanakan patroli.

“Jadi waktu itu regu saya terjebak di pasar yang memang sangat berbahaya. Itu kita terjebak di pertengahan pertikaian antar geng di sana. Jadi ada orang yang memegang kayak roket peluru panjang itu. Suara peluru suara segala macam juga lewat-lewat aja. Kita sama sekali tidak bisa bergerak kemana-mana. Dan kita cuma bisa

¹⁴⁶ YouTube R.A TNZ, “PEACEKEEPERS N INDONESIA TRADITIONAL DANCE!!! TARIAN INDONESIA ada di AFRIKA Loh!!,” diakses pada 18 Juni 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=N15reHousdk&t=474s>

mengawasi aja karena self defense juga tidak boleh dilakukan karena mereka tidak menyerang kita”¹⁴⁷

Meski dibekali dengan senjata lengkap, para personel Pasukan Garuda tidak dapat menggunakan senjatanya meski sedang terjebak di tengah konflik. Aturan ini sesuai dengan ketentuan dari prinsip dasar untuk PKO yaitu *non-use of force except in self-defense and defense of the mandate*. Penggunaan senjata oleh *peacekeepers* untuk membela diri hanya dapat dilakukan jika telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Keamanan PBB.¹⁴⁸

Pasukan Garuda perempuan telah memenuhi harapan untuk dapat turut berperan dalam misi perdamaian PBB khususnya MINUSCA. Personel perempuan telah menunjukkan peran mereka dalam misi MINUSCA yang dibuktikan dengan perannya mulai dari memberikan perlindungan kepada masyarakat sipil, memberikan bantuan kemanusiaan, memberikan dukungan kepada pemerintahan setempat untuk proses menuju perdamaian dan tugas lainnya yang harus dilaksanakan oleh *peacekeepers* MINUSCA. Oleh karena itu, personel perempuan Pasukan Garuda MINUSCA dikatakan telah memberikan peranan mereka dalam misi perdamaian PBB di Republik Afrika Tengah karena telah menjalankan kewajiban dan berperilaku sesuai dengan status mereka di kalangan masyarakat Republik Afrika Tengah, yaitu sebagai *peacekeepers*.

¹⁴⁷ Raden Anggie, Wawancara oleh Penulis dengan Salah Satu Pasukan FPU 1 MINUSCA, 06 Juni 2023.

¹⁴⁸ United Nations Department of Peacekeeping Operation, *United Nations Peacekeeping Operation Principles and Guidelines*, (New York: United Nations, 2008): 34, diakses 17 Juni 2023, https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/capstone_eng_0.pdf.

Berdasarkan data yang telah diperoleh, personel perempuan dari Pasukan Garuda MINUSCA sudah memenuhi hampir seluruh tugas yang disebutkan dalam mandat PBB mulai dari memberikan perlindungan kepada masyarakat, sesama *peacekeepers*, dan aset PBB melalui patroli. Pasukan Garuda perempuan juga memberikan dukungan kepada pemerintah Republik Afrika Tengah untuk proses transisi yang dalam aspek politik untuk meningkatkan demokrasi yang kurang di negara ini dengan turut membantu mengamankan kegiatan pemerintahan. Selain itu, para personel perempuan ini juga terlibat dalam memberikan fasilitas terhadap bantuan kemanusiaan melalui pembagian air bersih. Keterlibatan personel perempuan dalam misi MINUSCA juga telah menunjukkan upaya mereka untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia untuk mereka yang berada di wilayah konflik. Dengan pelaksanaan kewajiban sebagai *peacekeepers* menunjukkan bahwa personel perempuan dalam Pasukan Garuda telah memberikan peran mereka dalam misi MINUSCA sesuai dengan konsep peran dalam penelitian ini.

Personel perempuan dan laki-laki dalam Pasukan Garuda MINUSCA tidak menerima adanya perlakuan yang berbeda terkait gender mereka. Semua personel dianggap memiliki posisi yang setara antara satu sama lain. Meski tidak memiliki diskriminasi antar gender, namun para personel perempuan terkadang menerima pandangan yang mengarah pada hal negatif oleh masyarakat Republik Afrika Tengah. Sehingga para personel laki-laki biasanya memberikan perhatian atau perlindungan kepada para

personel perempuan untuk menghindari hal-hal tersebut. Para personel perempuan juga mengenakan pakaian yang tertutup mulai dari mengenakan helm, masker, dan pakaian tertutup hingga ujung kaki.

Keterlibatan perempuan dalam misi perdamaian, khususnya kasus anggota perempuan dalam Pasukan Garuda telah membuktikan bahwa perempuan juga dapat memberikan peran mereka untuk misi perdamaian bahkan di wilayah konflik yang cukup berbahaya sekalipun. Para perempuan yang tergabung dalam Pasukan Garuda MINUSCA menunjukkan kemampuan mereka untuk dapat memenuhi kewajiban dan tugas-tugas mereka sebagai seorang *peacekeepers*. Tanpa memperhatikan gender dan lain sebagainya baik laki-laki maupun perempuan patutnya dapat menerima kesempatan dan memberikan peran yang sama untuk membantu membentuk perdamaian di dunia ini. Meski berat meninggalkan keluarga, anak atau pasangan, tetapi para personel perempuan dalam Pasukan Garuda MINUSCA telah memberikan contoh yang luar biasa kepada para perempuan lain untuk terus memperjuangkan kemajuan perempuan dalam misi perdamaian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Selama bertahun-tahun PBB telah menekankan akan pentingnya peran perempuan dalam misi perdamaian. Menurut PBB, keterlibatan perempuan dalam misi perdamaian telah dianggap dapat meningkatkan tingkat keefektifan dari misi tersebut. Para perempuan yang menjadi *peacekeepers* telah membuktikan kemampuan mereka untuk dapat berperan aktif dalam membantu menjalankan mandat untuk misi perdamaian di berbagai wilayah konflik. Berbagai negara yang berpartisipasi dalam mengirimkan *peacekeepers* ke misi perdamaian juga terus berupaya untuk meningkatkan jumlah keterlibatan perempuan dalam pasukan mereka termasuk salah satunya Indonesia. Melalui Pasukan Garuda Bhayangkara FPU MINUSCA Indonesia telah melibatkan hampir 100 orang polisi wanita selama 4 tahun kebelakang.

Para perempuan Indonesia yang terlibat dalam Pasukan Garuda Bhayangkara FPU MINUSCA telah membuktikan kemampuan mereka untuk berperan aktif dalam menjalankan mandat misi perdamaian di Republik Afrika Tengah. Dengan masa kerja satu tahun, para personel perempuan ini memberikan upaya terbaik mereka untuk membantu menjaga kestabilan konflik di negara yang hancur akibat konflik saudara ini.

Personel perempuan telah memenuhi ketentuan dimana mereka disebut memberikan peran dalam misi MINUSCA karena telah menjalankan tugas dan kewajiban mereka sesuai dengan statusnya sebagai *peacekeepers*. Hal ini dibuktikan dengan personel perempuan yang turut berperan dalam menjalankan mandat PBB untuk MINUSCA mulai dari memberikan perlindungan kepada masyarakat, memberikan bantuan kemanusiaan hingga memberikan dukungan kepada otoritas pemerintah. Setiap harinya para personel perempuan melaksanakan kegiatan patroli berkeliling kota dan patroli gabungan dengan *peacekeepers* dari negara lain. Mereka juga melakukan kegiatan pengamanan saat ada kegiatan atau acara besar yang dilaksanakan oleh otoritas pemerintah Republik Afrika Tengah. Selain itu, personel perempuan Pasukan Garuda juga memiliki kelebihan tersendiri karena memiliki kepribadian yang ramah. Hal ini kemudian membuat para personel perempuan ini dapat membaaur dengan mudah kepada masyarakat.

Para personel perempuan telah melakukan tugas dan peran mereka tanpa adanya diskriminasi gender. Dibekali dengan kemampuan yang mumpuni untuk bertahan di wilayah konflik, para personel perempuan Pasukan Garuda membuktikan bahwa mereka juga dapat memiliki peran yang sama dengan personel laki-laki dalam misi MINUSCA.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang dapat peneliti berikan kepada beberapa pihak sebagai berikut.

1. Pemerintah Indonesia

Untuk tetap konsisten dalam usahanya meningkatkan keterlibatan perempuan Indonesia dalam Pasukan Garuda mengingat partisipasi mereka yang masih sangat sedikit. Selain itu dalam kancah internasional, pemerintah Indonesia juga dapat terus konsisten untuk menyuarakan akan pentingnya keterlibatan perempuan untuk misi perdamaian seperti yang telah dilakukan pada saat ini yang dibuktikan dengan pembentukan resolusi DK PBB 2538 oleh Indonesia.

2. Perempuan Indonesia

Perempuan Indonesia yang pernah terlibat dalam misi perdamaian PBB baik yang merupakan anggota polisi, TNI, maupun anggota perorangan yang ahli dibidang-bidang yang diperlukan dalam misi perdamaian, hopefully dapat terus memberikan contoh bagi masyarakat lainnya bahwa perempuan juga dapat berperan dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah konflik.

3. Peneliti selanjutnya

Dalam penelitian ini, peneliti merasa masih banyak kekurangan. Data-data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian ini juga masih kurang karena terkendala respon informan serta keterbatasan waktu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti hanya dapat menggali sumber utama dari satu orang anggota perempuan Pasukan Garuda Bhayangkara FPU 1 MINUSCA yang pernah bertugas di misi perdamaian Republik Afrika Tengah pada tahun 2019-2020. Sehingga peneliti selanjutnya dapat

menggali data yang lebih dalam dengan menghubungi anggota dari setiap pasukan yang pernah dikirimkan mulai dari tahun 2019 hingga tahun-tahun berikutnya. Maka dari itu, masih terbuka kesempatan untuk para peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan topik sejenis dan dengan data yang lebih kuat dengan menghubungi setiap anggota perempuan Pasukan Garuda.

4. Pembaca

Untuk pembaca, peneliti berharap penelitian ini dapat menambah wawasan akan luasnya peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk salah satunya menjadi bagian dari pasukan perdamaian yang mengharumkan nama negara.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Dewi Fortuna. "Indonesia's Peacekeeping Operation: History, Practice, and Future Trend." in *Asia-Pacific Nations in International Peace Support and Stability Operations*. Asia Today. Edited by Chiyuki Aoi and Yee Kuang Heng, 189-210. New York: Palgrave Macmillan, 2014.
- Biddle, Bruce J. *Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors*. New York: Academic Press, 2013.
- Bogdan, Robert C., dan Sari Knopp B., *Qualitative Research for Education: an introduction to theories and methods*. United States of America: Pearson Education, 2007.
- Esmenjaud, Romain *United Nations Mission in the Central African Republic (MINURCA)*, in Joachim A. Koops and others (eds), *The Oxford Handbook of United Nations Peacekeeping Operations*. Oxford: Oxford University Press, 2014. <https://academic.oup.com/edited-volume/28122/chapter/212301480>
- Gareis, Sven Bernhard. *The United Nations*, 2nd ed. London: Bloomsbury Publishing, 2012.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Presidensi Indonesia pada Dewan Keamanan PBB Mei 2019*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu, 2019.
- Mas'oed, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES, 1990
- Miles, Matthew B. dkk., *Qualitative Data Analysis: a Methods Sourcebook*. California: SAGE Publications, 2014
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010
- Narwoko, J. Dwi. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan Edisi Ketiga*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Paul-Crescent, M. Beninga. dkk. *Persistence Of The Crisis In The Central African Republic: Understanding In Order To Act*. Kamerun: Friedrich Ebert Stiftung, 2018
- Siyoto, Sandu dan M. Ali S. *Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013
- United Nations Department of Peacekeeping Operation. *United Nations Peacekeeping Operation Principles and Guidelines*. New York: United Nations, 2008
- United Nations. *The Blue Helmet: A Review of United Nations peace-keeping*. New York: United Nations Publication, 1996.
- Weyns, Yannick. dkk, *Mapping Conflict Motives: the Central African Republic*, Bangui: IPIS, 2014
- White, Nigel D. *Keeping the Peace: the United Nations and the maintenance of International Peace and Security*. Manchester: Manchester University Press, 1997.
- Zajda, J. dan K. Freeman. *Globalization and Gender Equity: In Race, Ethnicity, and Gender in Education Cross-Cultural Understanding*. Dordecht: Springer Netherlands, 2009.
- Zainal, Veitzal Rivai. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Depok: PT Raja Grafindo, 2004.

Jurnal

- Azizah, Nur., Hadidah Sallimi, dan Ainun Dwiyantri. "The Increasing Number of Female Troops in Indonesia's Peacekeeping Operations: Why Women's Presence Matters?." *Journal of Islamic World and Politics* Vol. 6 No. 1. (2022). <https://journal.umy.ac.id/index.php/jiwp/article/view/13509>.
- Galtung, Johan. "Institutionalizes Conflict Resolution: A theoretical paradigm," *Journal of Peace Research* Vol. 2 No. 4. (1965). doi: <https://doi.org/10.1177/002234336500200404>
- Hutabarat, Leonardo F. "Diplomasi Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB." *Jurnal Pertahanan* Vol. 6 No. 2. (2016). doi: <http://dx.doi.org/10.33172/jpbh.v6i2.308>
- Hutabarat, Leonardo F. "Indonesian Participation in the UN Peacekeeping as an Instrument of Foreign Policy: Challenges and Opportunities." *Global and Strategies* Vol. 8 No. 2. (2014). <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jgs45b74e5c14full.pdf>

- Hutabarat, Leonardo F. "Peningkatan Female Peacekeepers Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PB." *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara* Vol. 7 No.2 (2017). doi: <https://dx.doi.org/10.33172/jpbh.v7i2.180>
- Ini Diplomasi, "Indonesia Suarakan Peran dan Kontribusi Perempuan sebagai Agen Perdamaian." <https://kemlu.go.id/portal/id/read/1439/berita/indonesia-sua%20rakan-peran-dan-kontribusi-perempuan-sebagai-agen-perdamaian>
- Intan, Ghita. "Peran Penting Perempuan Tegakkan Perdamaian Dunia." <https://www.voaindonesia.com/a/peran-penting-perempuan-tegakkan-perdamaian-dunia/4866661.html>
- Istiana H, Nurul dan Akbar Kurnia P. "Peran Perempuan dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional." *Journal of International Law* Vol. 1 No. 2. (2020). <https://online-journal.unja.ac.id/Utiposidetis/article/view/10179>.
- Klosowicz, Robert. "Central African Republic:Portrait of A Collapsed State After The Last Rebellion." *POLITEJA* Vol. 42 No. 3. (2016). <https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/2152/1847>
- Nasution, Elyzabeth dkk. "Evolusi Peran Perempuan dalam Politik di Era Globalisasi." *UPH Journal of International Relations*, https://www.researchgate.net/publication/359727398_Evolusi_Perempuan_dalam_Politik_di_Era_Globalisasi/link/624b96018068956f3c6b3266/download
- Setyawati, Amelia., Helda Risman, dan Surryanto D.W. "MINUSCA on Its Mandate." *Technium Social Sciences Journal* Vol. 9, (2020). doi: <https://dx.doi.org/10.47577/tssj.v9i1.919>
- Soekma H, Titin. "Intervensi Kemanusiaan Pbb dalam Menangani Pelanggaran HAM Di Republik Afrika Tengah Pada Tahun 2013-2014." *eJurnal Ilmu Hubungan Internasional* Vol. 4 No. 1. (2016). <https://adoc.pub/intervensi-kemanusiaan-pbb-dalam-menangani-pelanggaran-ham-d.html>
- Timur, Fitriani Bintang. "The Tales of Three Asian Countries: How Indonesia, India and the Philippines Recruited Women for UN Peacekeeping Missions." *Jurnal Politik Internasional* Vol. 18 No.1 (2016). <https://scholarhub.ui.ac.id/global/vol18/iss1/3/>
- Tormgrimson, B.N dan C.T. Minson. "Sex and Gender: What is the Difference?" *Journal of Applied Physiology* 99, No. 33, (2005).
- Widianti, Herni. "Peran BINUCA (Bureau Intégré de l'Organisation des Nations Unies en Centrafrique) dalam Menjaga Perdamaian di Republik Afrika

Tengah Tahun 2010-2014.” *Jom FISIP* Vol. 2 No. 2 (2015).
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/7508/0>

Internet

BBC News. “UN peacekeepers killed in Central African Republic on eve of election.” diakses pada 29 Mei 2023. <https://www.bbc.com/news/world-africa-55451763>

BINUCA. “BINUCA Mandate.” diakses pada 09 Juni 2023.
<https://binuca.unmissions.org/en/mandate>

Britannica, “Role Definition”, diakses pada 18 Juli 2023,
<https://www.britannica.com/topic/role>

Cambridge Dictionary, “Role Definition,” diakses pada 18 Juli 2023,
<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/role>

Department of Peace Operations, *Uniformed Gender Parity Strategy 2018-2028*.

FISIP Universitas Indonesia. “Menjadi Perempuan Lebih Berbahaya dibandingkan Menjadi Pasukan Perdamaian.” diakses 11 Maret 2023.
<https://fisip.ui.ac.id/menjadi-perempuan-lebih-berbahaya-dibandingkan-menjadi-pasukan-perdamaian/>

Human Rights Watch. “Central African Republic: Armed Group Kills 46 Civilians.” diakses pada 30 Mei 2023.
<https://www.hrw.org/news/2019/07/18/central-african-republic-armed-group-kills-46-civilians>

Hutabarat, Leonardo F. “Indonesia dan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB.” *Majalah Legiun Veteran*, Januari, 2016. diakses pada 07 Maret 2023.
https://www.academia.edu/70861274/Indonesia_dan_Pasukan_Penjaga_Perdamaian_PBB

KBBI, “Pengertian Peran”, diakses pada 17 Juli 2023, <https://kbbi.web.id/peran>

Kementerian Luar Negeri Indonesia. “Indonesia and the Peacekeeping Mission,” diakses 14 Februari 2023.
https://kemlu.go.id/portal/en/read/91/halaman_list_lainnya/indonesia-and-the-united-nations-peacekeeping-mission

Kementerian Luar Negeri Indonesia. “Kementerian Luar Negeri RI Luncurkan Buku Indonesia dan Rekam Jejak di Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB.” diakses 19 Januari 2023.

<https://kemlu.go.id/portal/id/read/2329/berita/kementerian-luar-negeri-ri-luncurkan-buku-indonesia-dan-rekam-jejak-di-misi-pemeliharaan-perdamaian-pbb>

Kementerian Luar Negeri Indonesia. "Peran Krusial Penjaga Perdamaian Perempuan, Sebagai Agen Perdamaian, Toleransi, dan Kemakmuran." diakses 9 Maret 2023. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/343/berita/peran-krusial-penjaga-perdamaian-perempuan-sebagai-agen-perdamaian-toleransi-dan-kemakmuran>

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. "Keanggotaan Indonesia pada DK PBB." diakses 9 Maret 2023. https://kemlu.go.id/portal/id/read/147/halaman_list_lainnya/keanggotaan-indonesia-pada-dk-pbb

Keputusan Presiden (KEPPRES) No 7 Tahun 2019 tentang Pengalihan Penugasan Kontingen Garuda Bhayangkara Satuan Tugas Formed Police Unit Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Sudan Selatan Menjadi Kontingen Garuda Bhayangkara Satuan Tugas Formed Police Unit Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Afrika Tengah.

Kompas.com. "Pasukan Garuda, Pasukan Perdamaian Indonesia." 12 April, 2022. diakses 07 Maret 2023. <https://www.kompas.com/stori/read/2022/04/12/120000279/kontingen-garuda-pasukan-perdamaian-indonesia?page=all>

Kumparan. "Ipda Della, Polwan Asal Lampung Pertama Kali Pimpin Upacara Internasional di PBB." diakses pada 18 Juni 2023. <https://kumparan.com/lampunggeh/ipda-della-polwan-asal-lampung-pertama-kali-pimpin-upacara-internasional-di-pbb-1ylws0P1Fb1/full>

La Banque Mondiale. "République Centrafricaine - Vue d'ensemble." diakses pada 07 Juni 2023. <https://www.banquemondiale.org/fr/country/centralafricanrepublic/overview#1>

Maula, Muhammad Khizbul. "Peran United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission In The Central African Republic (MINUSCA) Dalam Proses Gencatan Senjata Di Republik Afrika Tengah (RAT) Pada 2014-2015." Skripsi., Universitas Brawijaya, 2019. <http://repository.ub.ac.id/eprint/171414/1/Muhammad%20Khizbul%20Maula.pdf>

MINUSCA, About Mandate, diakses pada 07 Mei 2023, <https://minusca.unmissions.org/en/mandate>

MINUSCA. “About MINUSCA.” diakses pada 15 Juni 2023. <https://minusca.unmissions.org/en/about>

MINUSCA. “Central African Republic: UN Reports Detail Serious Violation, Some Possibly Amounting to War Crimes and Crimes Against Humanity.” diakses pada 29 Mei 2023. <https://minusca.unmissions.org/en/central-african-republic-un-reports-detail-serious-violations-some-possibly-amounting-war-crimes-and>

MISCA. “MISCA Establishment.” diakses pada 09 Juni 2023. <http://misca.peaceau.org/en/page/110-about-misca>

Mumtazinur. “Peran Perempuan dalam Proses Pemulihan Perdamaian di Burundi melalui Penerapan Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB.” *International Journal of Child and Gender Studies* Vol. 3 No. 1 (2017). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/1951>

OHCHR Reports. “Rapport Sur Les Violences Sexuelles Liees Aux Conflits Commises Par Le Fprc Et L’upc Dans Les Prefectures Du Mbomou Et De La Haute-Kotto Décembre 2020 – Mars 2022.” diakses pada 03 Juni 2023. <https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2022/07/report/auto-draft/rapport-violences-sexuelliees-conflits-Bakouma.pdf>

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, alinea 4

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengiriman Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2015 Tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian.

Polri. “Lepas Pasukan Perdamaian PBB, Kapolri: Selalu Pedomani Tribrata dan Catur Prasetya.” diakses 07 Maret 2023. <https://polri.go.id/berita-polri/1539>

Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI. “Profil PMPP TNI.” diakses 14 Februari 2023. <https://ppid.tni.mil.id/view/32435571/profil-pmpp-tni.html>

ReliefWeb by UNOCHA. “Central African Republic Humanitarian Needs Overview 2023 – English Summary (January 2023).” <https://reliefweb.int/report/central-african-republic/central-african-republic-humanitarian-needs-overview-2023-english-summary-january-2023>

ReliefWeb by UNOCHA. “Political Agreement for Peace and Reconciliation in the Central African Republic, February 2019 (S/2019/145).” diakses pada 18 Juni 2023, <https://reliefweb.int/report/central-african-republic/political-agreement-peace-and-reconciliation-central-african>

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. “Selesai Agustus 2020, Ini Capaian Indonesia Sebagai Presidensi Dewan Keamanan PBB.” diakses 20 Januari 2023, <https://setkab.go.id>

Statement by the President of the Security Council (S/PRST/2009/5)

Tribun Pontianak. “Kisah Iptu Ina, Polwan Kalbar Penjaga Perdamaian PBB di Afrika.” diakses pada 17 Juni 2023. <https://tribunpontianakwiki.tribunnews.com/2021/01/21/kisah-iptu-ina-polwan-kalbar-penjaga-perdamaian-pbb-di-afrika?page=all>

UN Women Asia and Pacific. “Take Five: “The role of women in building international peace is increasing, but needs more of us to step up.” diakses pada 17 Juni 2023. <https://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2021/05/take-five-inayatun-nurhasanah>

Unair News. “Ratih Pusparini, Alumnus Pembawa Misi Perdamaian di Negara Konflik.” diakses pada 9 Maret 2023. <https://news.unair.ac.id/2017/04/27/ratih-pusparini-alumnus-pembawa-misi-perdamaian-di-negara-konflik/>

UNHCR. “Central African Republic Situation.” diakses pada 31 Mei 2023. <https://reporting.unhcr.org/operational/situations/central-african-republic-situation>

United Nations Department of Peacekeeping Operation, *United Nations Peacekeeping Operation*, 31-35.

United Nations Department of Peacekeeping Operations. “Formed Police Unit in United Nations Peacekeeping Operations.” diakses pada 15 Juni 2023, https://police.un.org/sites/default/files/fpu_policy_2016.pdf

United Nations Human Rights. “UN expert condemns attack on Central African Armed Forces in Sikikédé, calls armed rebels “enemies of the peace.” diakses pada 29 Mei 2023. <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/03/un-expert-condemns-attack-central-african-armed-forces-sikikedede-calls-armed>

United Nations News. “Over 600 people killed, 159,000 displaced in Central African Republic – UN.” diakses pada 30 Mei 2023. <https://news.un.org/en/story/2013/12/457782>

- United Nations Peacekeeping. “Central African Republic MINURCA.” diakses pada 08 Juni 2023. <https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/past/car.htm>
- United Nations Peacekeeping. “Contribution of Uniformed Personnel to UN by Country and Personnel Type.” diakses 11 Februari 2023. https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/01_contributions_to_un_peacekeeping_operations_by_country_and_post_55_october_22.pdf
- United Nations Peacekeeping. “Mandated to Protect Civilians and Support Transition Processes in the Central African Republic.” diakses 15 Februari 2023. <https://peacekeeping.un.org/en/mission/minusca>
- United Nations Peacekeeping. “Mandates and Legal Basis for Peacekeeping.” diakses 12 Februari 2023, <https://peacekeeping.un.org/en/mandates-and-legal-basis-peacekeeping>
- United Nations Peacekeeping. “MINURCA Background.” diakses pada 08 Juni 2023. <https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/past/minurcaB.htm>
- United Nations Peacekeeping. “Our History.” diakses 07 Maret 2023. <https://peacekeeping.un.org/en/our-history>
- United Nations Peacekeeping. “Our Peacekeepers.” diakses pada 12 Februari 2023. <https://peacekeeping.un.org/en/our-peacekeepers>
- United Nations Peacekeeping. “Peacekeeping Operations Fact Sheet.” diakses 13 Januari 2023, https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/peacekeeping_missions_fact_sheet_october_2022_english.pdf
- United Nations Peacekeeping. “Summary of Contribution to UN Peacekeeping by Country, Mission and Post (February 2019).” diakses pada 15 Juni 2023. https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/5_mission_and_country_13.pdf
- United Nations Peacekeeping. “Summary of Contribution to UN Peacekeeping by Country, Mission and Post.” diakses 27 Januari 2023. https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/03_country_and_mission_34_jan2021.pdf
- United Nations Peacekeeping. “Troops and Police Contributors.” diakses pada 18 Juni 2023. <https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors>
- United Nations Peacekeeping. “Uniformed Personnel Contributing Countries by Ranking.” diakses 13 Januari 2023, <https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors>

- United Nations Peacekeeping. "What is Peacekeeping." diakses pada 07 Mei 2023. <https://peacekeeping.un.org/en/what-is-peacekeeping>
- United Nations Peacekeeping, "What We Do," diakses pada 18 Juli 2023, <https://peacekeeping.un.org/en/what-we-do>
- United Nations Peacekeeping. "Women in Peacekeeping A Key to Peace." diakses 21 Januari 2023, https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/wipk_infographic_2022.pdf
- United Nations Peacekeeping. "Women in Peacekeeping." diakses pada 09 Mei 2023. <https://peacekeeping.un.org/en/women-peacekeeping#:~:text=Women%20peacekeepers%20improve%20overall%20peacekeeping,of%20peace%20and%20political%20processes>
- United Nations Security Council Resolution 2127 (S/RES/2127 (2013))
- United Nations Security Council Resolution 2149 (S/RES/2149 (2014))
- United Nations Security Council. "Chapter V Subsidiary organs of the Security Council." diakses pada 08 Juni 2023. https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/en/sc/repertoire/2000-2003/00-03_5.pdf#page=33
- UNOCHA. "Central African Republic Surviving gender-based violence." diakses pada 02 Juni 2023. <https://reports.unocha.org/en/country/car/card/4yzspZJ54C/>
- UNOCHA. "Central African Republic: humanitarian needs remain severe in 2023." diakses pada 07 Juni 2023. <https://reports.unocha.org/en/country/car/card/19ACl657GI/>
- UNOCHA. "Gender-based violence: a scourge with devastating consequences." diakses pada 02 Juni 2023. <https://reports.unocha.org/en/country/car/card/4FOp0JIGKg/>
- VOA Indonesia. "Pemerintah, Pemberontak Afrika Tengah Sepakat Bentuk Pemerintahan Bersatu." diakses pada 14 Februari 2023. <https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-pemberontak-car-sepakat-bentuk-pemerintahan-bersatu/1582449.html>
- World Bank. "the World Bank in Central African Republic." diakses pada 25 Mei 2023. <https://www.worldbank.org/en/country/centralafricanrepublic/overview>
- World Peace Foundation. "United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA) / African-led International Support Mission in the Central African Republic

(MISCA) Short Mission Report.” diakses pada 10 Juni 2023.
<https://sites.tufts.edu/wpf/files/2017/07/Central-African-Republic-brief.pdf>

YouTube 86 & Custom Protection NET. “Pelatihan Pre Deployment Visit & UN FPAT FPU 1 Minusca.” diakses pada 15 Juni 2023.
<https://www.youtube.com/watch?v=BxQ6tSudG7E>

YouTube Divisi Humas Polri. “PBB Berikan Penghargaan Kepada Satgas Garbha FPU 3 MINUSCA.” diakses pada 18 Juni 2023.
<https://www.youtube.com/watch?v=TVIopCIunHc>

YouTube Peacekeepers Polri. “GARUDA CAMP DI BANGUI CENTRAL AFRIKA - FPU 1 MINUSCA.” diakses pada 17 Juni 2023.
<https://www.youtube.com/watch?v=W5DScxIyt8w>

YouTube Peacekeepers Polri. “POLWAN PEACEKEEPER POLRI SEBELUM DIBERANGKATKAN KE DAERAH MISI - FPU 1 MINUSCA.” diakses pada 15 Juni 2023.
<https://www.youtube.com/watch?v=5fRXiFQet6M&t=29s>

YouTube R.A TNZ. “GIAT PENGAMANAN Pasukan Garuda BHAYANGKARA di Rep. Afrika Tengah!!!” diakses pada 17 Juni 2023.
https://www.youtube.com/watch?v=Dkt_0aea6hA

YouTube R.A TNZ. “PEACEKEEPER POLRI itu Apa sih??.” diakses pada 17 Juni 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=nHAeg5uDjqI>

YouTube R.A TNZ. “PEACEKEEPERS N INDONESIA TRADITIONAL DANCE!!! TARIAN INDONESIA ada di AFRIKA Loh!!!” diakses pada 18 Juni 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=Nl5reHousdk&t=474s>

YouTube 86 & Custom Protection NET. “Momen Haru Pelepasan Tim Satgas Garbha FPU 1 Minusca ke Daerah Misi.” diakses pada 17 Juni 2023.
<https://www.youtube.com/watch?v=DLDML8TDFUs>